



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.445, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Rencana Kerja.
Tahun 2012.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.57/MENHUT-II/2011

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)

KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2012

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014 dan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kehutanan Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
 10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014;
 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2012.**

Pasal 1

Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kehutanan Tahun 2012 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Renja Kementerian Kehutanan ini menjadi acuan dalam penyusunan Renja dan dokumen anggaran unit kerja Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Kehutanan Tahun 2012.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Kehutanan menyusun Renja Tahun 2012 mengacu pada Renja Unit Kerja Eselon I-nya.

Pasal 4

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2011
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012 ini merupakan rencana yang proses penyusunannya melibatkan para pihak baik didalam lingkup Kementerian Kehutanan maupun pemerintah daerah dan masyarakat, yang dimulai dari identifikasi permasalahan, capaian pembangunan kehutanan Tahun 2010, perkiraan capaian Tahun 2011 dan rencana Tahun 2012 melalui forum Rapat Koordinasi Pembangunan Kehutanan Daerah di seluruh provinsi (Rakorenbanghutda) serta Rapat Koordinasi Pembangunan Kehutanan Regional (Rakorenbanghutreg). Usulan program dan kegiatan Tahun 2012 selanjutnya di bahas di dalam *retreat* tingkat Menteri di Istana Bogor yang dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, dan sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Dari hasil ini diperoleh pagu indikatif sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor : 0091/M.PPN/03/2011 dan SE-189.1/MK.02/2011, yang selanjutnya dilakukan Pertemuan tiga pihak (*trilateral meeting*) antara Kemenhut, BAPPENAS dan Kementerian Keuangan pada tanggal 6 April 2011.

Kesepakatan hasil pertemuan tiga pihak selanjutnya ditindaklanjuti dengan mendistribusikan rencana capaian Tahun 2012 ke setiap provinsi dan dibahas dalam pertemuan tiga pihak antara Kemenhut, BAPPENAS dan BAPPEDA (didampingi DISHUT Provinsi) untuk menyepakati capaian pembangunan kehutanan di tingkat provinsi dalam forum Pramusrenbangnas (pertemuan pendahuluan dari Musyawarah Pembangunan Nasional), dan selanjutnya dibahas dalam Musrenbangnas yang melibatkan seluruh nama Menteri dan Gubernur seluruh Indonesia.

Beberapa upaya di atas, diharapkan dapat memperluas keterlibatan para pihak meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kemenhut Tahun 2012. Semata-mata, hal ini dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab dan peran yang diambil Kemenhut di dalam Kabinet Indonesia Bersatu II yang ditunjukkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Renstra Kemenhut Tahun 2010-2014.

Khusus di lingkungan internal Kemenhut, upaya ini diharapkan dapat mendorong reformasi perencanaan, yang secara langsung diharapkan dapat mendorong reformasi birokrasi dengan adanya akuntabilitas pelaksanaan program (*outcome*, ditunjukkan dalam indikator kinerja utama/IKU) yang menjadi tanggung jawab Pejabat Eselon I, dan pelaksanaan kegiatan (*output*, ditunjukkan dalam indikator kinerja kegiatan/IKK) yang menjadi tanggung jawab dari Pejabat Eselon II dan kepala UPT.

Renja Kemenhut ini merupakan dokumen resmi perencanaan yang mengikat seluruh elemen Kemenhut, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan. Untuk selanjutnya menjadi panduan dalam penyusunan Renja unit kerja eselon I, II dan UPT, serta penetapan kinerja lingkungan Kemenhut dan unit kerja Eselon I. Dengan demikian, Renja ini merupakan alat untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan kehutanan dalam bentuk laporan tahunan dan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Tahun 2012.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan hidayahnya bagi kita semua, sehingga seluruh capaian pembangunan kehutanan Tahun 2012 dapat tercapai. Amin.

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indikatif alokasi anggaran Kemenhut Tahun 2012 adalah Rp.6,00 trilyun, yang kebijakan dalam penganggarannya didasarkan pada : Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan APBN, yang dilakukan dengan meningkatkan percepatan penyelesaian permasalahan utama/kondisi pemungkin (*enable conditions*) pembangunan kehutanan, memberikan prioritas untuk target pembangunan nasional dan memantapkan restrukturisasi program dan kegiatan.

Sasaran pembangunan Tahun 2012 adalah : Tata batas kawasan hutan sepanjang 16.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan, Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di seluruh provinsi dan beroperasinya 60 KPH (10% wilayah KPH yang telah ditetapkan), Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 1 judul, Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 500.000 ha, Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (*Logged over area/LOA*) seluas 450.000 ha, Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50%, Jumlah *Hotspot* kebakaran hutan menurun 48,8%, dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, *illegal logging* dan *wildlife traficking* sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya hutan, Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 1,5% dari kondisi Tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat, Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 36 DAS prioritas, Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 399.000 ha, Terbangunnya Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 400.000 ha, Terbangunnya Hutan Desa Seluas 100.000 ha, Penyediaan keteknikan kehutanan dan pengelolaan hasil hutan, produktifitas hutan, konservasi dan rehabilitasi, serta perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 60%, Terbentuknya 12 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat, Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya minimal sebanyak 3.000 orang, Penanganan perkara, pemulihan hak-hak Negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 48%, Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan "wajar tanpa pengecualiaan" mulai laporan keuangan Tahun 2011, Kelemahan administrasi dan pelanggaran terhadap

peraturan perundangan diturunkan sampai 30%, serta potensi kerugian Negara diturunkan hingga 15%.

Capaian pembangunan kehutanan Tahun 2012 difasilitasi dalam 8 program dan diharapkan dapat mendorong pembangunan kehutanan mewujudkan Hutan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, yaitu: Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan, Peningkatan Usaha Kehutanan, Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan, Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan, Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan, serta Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan.

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	: Aparat Pengawas Internal Pemerintah
Bakorluh	: Badan Koordinasi Penyuluhan
Bapelluh	: Badan Pelaksana Penyuluhan
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BDK	: Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan
BKSDA	: Balai Konservasi Sumberdaya Alam
BPA	: Balai Persuteraan Alam
BPDAS	: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
BPDASPS	: Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial
BPHM	: Balai Pengelolaan Hutan Mangrove
BPKH	: Balai Pemantapan Kawasan Hutan
BP ₂ HP	: Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produk
BPTH	: Balai Perbenihan Tanaman Hutan
BSN	: Badan Standarisasi Nasional
BTN	: Balai Taman Nasional
BLU	: Badan Layanan Umum
BUK	: Bina Usaha Kehutanan
CA	: Cagar Alam
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAS	: Daerah Aliran Sungai
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DNS	: <i>Dept Nature Swamp</i>
DAOPS	: Daerah Operasional
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPR- RI	: Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia
Diklat	: Pendidikan dan Pelatihan
GRK	: Gas Rumah Kaca
HA	: Hutan Alam
HD	: Hutan Desa
HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu
HKm	: Hutan Kemasyarakatan
HL	: Hutan Lindung
HoB	: <i>Heart of Borneo</i>
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
HR	: Hutan Rakyat
HT	: Hutan Tanaman
HTI	: Hutan Tanaman Industri

HTR	: Hutan Tanaman Rakyat
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
IKU	: Indikator Kinerja Utama
INCAS	: <i>Indonesia's National Carbon Accounting System</i>
IPB	: Institut Pertanian Bogor
IPK	: Ijin Pemanfaatan Kayu
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IPHHK	: Industri Primer Hasil Hutan Kayu
Itjen	: Inspektorat Jenderal
IUPHHK	: Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Jasling	: Jasa Lingkungan
Kanwil	: Kantor Wilayah
KBR	: Kebun Bibit Rakyat
Kemendiknas	: Kementerian Pendidikan Nasional
Kemenhut	: Kementerian Kehutanan
KIM	: Kampanye Indonesia Menanam
KPA	: Kawasan Pelestarian Alam
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHP	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
KPHK	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi
KPHL	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KSA	: Kawasan Suaka Alam
KSDA	: Konservasi Sumber Daya Air
KSDH	: Konservasi Sumber Daya Hutan
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Litbang	: Penelitian dan Pengembangan
LOA	: <i>Logged Over Area</i>
Menhut	: Menteri Kehutanan
PKPT	: Program Kerja Pengawasan Tahunan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PHPL	: Pengelolaan Hutan dan Konservasi Alam
PP	: Peraturan Pemerintah
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
RBA	: Rencana Bisnis Anggaran
RE	: Restorasi Ekosistem
Renstra	: Rencana Strategis
Renja	: Rencana Kerja
REDD	: <i>Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation</i>
RHL	: Rehabilitasi Hutan dan Lahan
RKA-KL	: Rencana Kerja dan Anggaran- Kementerian/Lembaga
RTRWP	: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

RLPS	: Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
SDA	: Sumberdaya Alam
SDH	: Sumberdaya Hutan
SDM	: Sumberdaya Manusia
Setjen	: Sekretariat Jenderal
SILIN	: Silvikultur Intensif
SIM PUHH	: Sistem Informasi Manajemen Penatausahaan Hasil Hutan
SIMPEG	: Sistem Manajemen Kepegawaian
SM	: Suaka Margasatwa
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SIMAK BMN	: Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara
Satker	: Satuan Kerja
SIM RLPS	: Sistem Informasi Manajemen RLPS
TAHURA	: Taman Hutan Rakyat
TB	: Taman Buru
TN	: Taman Nasional
TPTI	: Tebang Pilih Tanam Nasional
TSL	: Tumbuhan dan Satwa Liar
TWA	: Taman Wisata Alam
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UI	: Universitas Indonesia
UNJ	: Universitas Negeri Jakarta
UNS	: Universitas Negeri Sebelas Maret
UU	: Undang-undang
UPT	: Unit Pelaksana Teknis

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012. Hal ini disadari karena RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah untuk seluruh sektor, sedangkan Renja Kemenhut hanya mengambil peran untuk sektor kehutanan.

Penyusunan RKP dan Renja Kemenhut Tahun 2012 dilakukan paralel, dimulai dari : (1) identifikasi kegiatan yang disandingkan dengan arahan capaian pembangunan kehutanan tingkat provinsi yang dilakukan melalui forum Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah tingkat Provinsi (Rakorenbanghutda), dan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Regional (Rakorenbanghutreg); (2) Usulan program dan kegiatan Kemenhut dalam *retreat* tingkat Menteri di Istana Bogor yang dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, dan sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia; (3) Pertemuan tiga pihak (*trilateral meeting*) antara Kemenhut, BAPPENAS dan Kementerian Keuangan; (4) Pertemuan tiga pihak antara Kemenhut, BAPPENAS dan BAPPEDA (didampingi DISHUT Provinsi) untuk menyepakati capaian pembangunan kehutanan di tingkat provinsi dalam forum Pramusrenbangnas (pertemuan pendahuluan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional); dan (5) Musrenbangnas yang melibatkan semua Menteri dan Gubernur seluruh Indonesia.

B. Renstra Kemenhut Tahun 2010-2014.

Kawasan hutan di Indonesia meliputi areal kurang lebih seluas 136,88 juta hektar, termasuk kawasan konservasi perairan (atau 70% dari luas Indonesia). Barang dan jasa yang dihasilkannya berperan dalam mendukung pembangunan nasional sebagai : (1) kontributor terhadap pembangunan perekonomian nasional, daerah dan masyarakat; (2) penyangga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara.

Posisi kawasan hutan menjadi lebih penting karena dari 220 juta penduduk Indonesia (Tahun 2003), 48,8 juta orang diantaranya tinggal sekitar kawasan hutan, dan kurang lebih 10,2 juta secara struktural termasuk kategori miskin/tertinggal. Penduduk tersebut sebagian bermata pencaharian langsung dari hutan yang ada disekitarnya, sedangkan yang bekerja disektor swasta kurang lebih 3,4 juta orang. Secara tradisi, pada umumnya masyarakat yang bermata pencaharian langsung dari hutan melakukan

pemanfaatan berbagai jenis produk-produk hasil hutan, baik kayu maupun non kayu seperti damar, gaharu, rotan dan lebah madu.

Gambaran diatas akhirnya menempatkan kawasan hutan sebagai bagian penting dari pembangunan, yang pada tingkat internasional diakui sebagai ukuran keberhasilan pembangunan sebuah negara, beberapa diantaranya adalah *Millennium Development Goals (MDGs)*, *Convention on Biological diversity (CBD)*, *United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, dan *United Nation Convention to Combat Desertification (UNCCD)*, *Rio Declaration, Forest Principle (authoritative Statement of Principles for A Global Consensus on Management, Conservation, and Sustainable Development)*, dan Agenda 21.

Permasalahan yang telah dirumuskan dan hendak diselesaikan oleh Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut: (1) Belum semua kawasan hutan baik batas luar maupun batas fungsi dilakukan tata batas; (2) Belum semua kawasan hutan dikelola dalam unit-unit pengelolaan, khususnya pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di luar Pulau Jawa; (3) Tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan maupun hasil-hasilnya, termasuk ancaman kebakaran hutan dan lahan; (4) Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya upaya-upaya konservasi sumberdaya alam, khususnya dalam konteks pelestarian jenis-jenis flora dan fauna serta lingkungan abiotiknya; (5) Lahan kritis termasuk kategori sangat kritis masih luas yang berdampak pada menurunnya daya dukung DAS, terutama dalam kaitannya dengan sistem tata air dalam hubungannya dengan masalah bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor; (6) Belum optimalnya pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi jasa hutan; (7) Kesenjangan antara *supply* dan *demand* bahan baku industri kehutanan, khususnya kayu, yang belum secara optimal disediakan dari hutan tanaman industri dan hutan rakyat, disamping masih rendahnya efisiensi produksi industri hasil hutan; (8) Hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta produk dari hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan secara struktur belum secara nyata mendorong pengembangan/pemberdayaan perekonomian masyarakat; (9) Minat investasi di bidang kehutanan yang kurang kondusif karena sering terhambat oleh permasalahan tenurial, tumpang tindih peraturan (pusat dengan daerah), dan kurangnya insentif permodalan, perpajakan dan retribusi; (10) Kurangnya data informasi kehutanan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak; (11) Pengembangan IPTEK kehutanan belum secara optimal menunjang untuk kebutuhan informasi dalam menetapkan kebijakan dan operasionalisasi teknis pengelolaan hutan di lapangan; (12) Kapasitas kelembagaan

kehutanan yang masih terbatas termasuk kapasitas (kualitas dan kuantitas) sumberdaya manusia SDM, baik pada tatanan pemerintah terutama pemerintah kabupaten/kota. Serta masyarakat khususnya yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Visi Kemenhut Tahun 2010-2014 dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan adalah: **Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan**. Untuk mewujudkan visi diatas, maka misi dan tujuan masing-masing misi, ditetapkan sebagai berikut:

1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan secara lestari.
2. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Misi ini bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi.
3. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Misi ini bertujuan menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam.
4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS). Misi ini bertujuan meningkatkan kondisi, fungsi, dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyediakan teknologi dasar dan terapan. Misi ini bertujuan untuk menyediakan informasi ilmiah dalam pengelolaan hutan lestari, baik dalam tatanan perumusan kebijakan maupun kegiatan teknis pengelolaan hutan di lapangan.
6. Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan Kementerian Kehutanan. Misi ini bertujuan untuk penyediaan perangkat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan hutan lestari, peningkatan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) bidang kehutanan dan terlaksananya tertib administrasi pada Kementerian Kehutanan.
7. Mewujudkan sumberdaya kehutanan yang profesional. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM kehutanan yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan.

Sasaran strategis Kementerian Kehutanan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sampai dengan akhir Tahun 2014 adalah sebagai berikut: (1) Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan

hutan; (2) Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan); (3) Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 5 judul; (4) Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 2,65 juta ha; (5) Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (*logged over area/LOA*) seluas 2,5 juta ha; (6) Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50%; (7) Jumlah *hotspot* kebakaran hutan menurun 20% setiap Tahun, dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, *illegal logging* dan *wildlife traficking* sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya hutan; (8) Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi Tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat; (9) Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 DAS prioritas; (10) Tanaman rehabilitasi pada hutan dan lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 2,5 juta ha; (11) Terbangunnya hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta hektar; (12) Terbangunnya hutan desa seluas 500.000 ha; (13) Penyediaan teknologi dasar dan terapan silvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi guna mendukung pengelolaan hutan lestari sebanyak 25 judul; (14) Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat; (15) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya minimal 15.000 orang peserta; (16) Penanganan perkara, pemulihan hak-hak negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 80% di akhir Tahun 2014; (17) Opini laporan keuangan Kemenhut tahunan "wajar tanpa pengecualian" mulai laporan keuangan Tahun 2011; (18) Kelemahan administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan diturunkan sampai 50%, serta potensi kerugian negara diturunkan hingga 25%.

Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan kehutanan, dalam 5 (lima) tahun kedepan Kementerian Kehutanan menetapkan 6 (enam) prioritas: (1) Pemantapan Kawasan Hutan; (2) Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS); (3) Pengamanan Hutan dan Pengendalian kebakaran Hutan; (4) Konservasi Keanekaragaman Hayati; (5) Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan; (6) Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di atas, maka dalam Tahun 2010-2014 Kementerian Kehutanan akan melaksanakan 8 program. Adapun *outcome* dan indikator kinerja utama setiap program adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan, *outcome* dari program ini adalah terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Kondisi ini antara lain sebagai prakondisi dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, serta secara tidak langsung menjadi bagian dalam penanganan terhadap isu-isu perubahan iklim. Program ini memiliki indikator kinerja utama antara lain: (1) Data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul, (2) Ijin pinjam pakai kawasan hutan terlayani 100% secara tepat waktu, (3) Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan dan penataan ruang sebanyak 4 judul, (4) Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 Km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan, (5) Penunjukkan kawasan hutan provinsi selesai 100%, (6) Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan ditetapkan di setiap provinsi dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan).
- b. Program Peningkatan Usaha Kehutanan, *outcome* dari program ini adalah peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan daya saing industri primer hasil hutan, serta peningkatan produksi dan diversifikasi hasil hutan. Program ini memiliki indikator kinerja utama: (1) Areal hutan produksi tertata dalam unit-unit pengelolaan berupa KPHP di 18 provinsi dan usaha pemanfaatan (ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam/hutan tanaman/ IUPHHK-HA/HT, IUPHH bukan kayu/IUPHH restorasi ekosistem/IUPHH jasa lingkungan/pemanfaatan kawasan) di 26 provinsi; (2) Produksi dan diversifikasi usaha pemanfaatan pada hutan alam produksi meningkat sebesar 5%, terdiri dari hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan, dan restorasi ekosistem; (3) Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK—HA/RE) pada areal bekas tebangan (*logged over area/LOA*) seluas 2,5 juta ha; (4) Kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman dan intensitas pemanfaatan hutan produksi meningkat (penambahan tanaman pada hutan tanaman seluas 2.650.000 ha); (5) Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meningkat 10%; (6) Kinerja industri pengolahan hasil hutan meningkat (50% produk bersertifikat legalitas kayu).
- c. Program konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan. Program ini memiliki *outcome* yaitu *biodiversity* dan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat

- bangsa dalam pergaulan global. Indikator kinerja utamanya adalah: (1) Terbangunnya sistem pengelolaan di 12 BLU di UPT PHKA; (2) Konflik dan tekanan terhadap kawasan TN dan KK lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5%; (3) Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi Tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat; (4) Kasus baru tindak pidana kehutanan (logging, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran hutan) penanganannya terselesaikan minimal 75%; (5) *Hotspot* (titik api) di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun; (5) Meningkatnya pengusahaan pariwisata alam sebesar 6% dibanding Tahun 2009.
- d. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, yang memiliki *outcome* berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas. Indikator kinerja utama dari program ini adalah: (1) Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, gambut, dan rawa pada DAS Prioritas seluas 2,5 juta ha; (2) Terbangunnya hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha; (3) Terbangunnya hutan rakyat kemitraan seluas 250.000 ha; (4) Terbangunnya sumber benih baru seluas 6.000 ha, pengelolaan areal sumber benih yang telah ada seluas 4.500 ha; (5) Terbangunnya hutan desa seluas 500.000 ha; (6) Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 unit DAS prioritas.
- e. Program penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan. *Outcome* dari program ini adalah meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha melalui upaya penyuluhan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya. Indikator kinerja utama dari program ini adalah: (1) Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan dalam rangka peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat; (2) Terbentuknya 500 kelompok masyarakat produktif mandiri; (3) Sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 1.500 orang; (4) Pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya sebanyak 15.000 orang peserta; (5) Pendidikan menengah kehutanan sebanyak 1.440 orang.
- f. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan, yang memiliki target *outcome* minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim. Indikator kinerja utama dari program ini adalah: (1) IPTEK dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna untuk bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) sebanyak 7

paket; (2) IPTEK dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 6 paket IPTEK; (3) IPTEK dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang keteknikan hutan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 paket IPTEK; (4) IPTEK dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 paket IPTEK.

- g. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan, *outcome* dari program ini adalah terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Kehutanan, serta mendorong perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Kehutanan. Indikator kinerja utama dari program ini adalah: (1) Kelemahan administrasi diturunkan sampai 50% dari Tahun 2009; (2) Pelanggaran terhadap peraturan perundangan berkurang sampai 50% dari Tahun 2009; (3) Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas berkurang hingga 50% dari Tahun 2009; dan (4) Potensi kerugian negara dapat diturunkan hingga 25% dari temuan Tahun 2006-2009.
- h. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan, dengan *outcome* adalah meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Kemenhut secara efektif dan efisien. Indikator Kinerja Utama dari program ini adalah : (1) Opini laporan keuangan Kemenhut tahunan "wajar tanpa pengecualian" mulai laporan keuangan Tahun 2011 sebanyak 1 judul per Tahun; (2) Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 69 unit perusahaan terselesaikan sebesar 80%; (3) Pencapaian sasaran strategis minimal 95% di akhir Tahun 2014; (4) Tersesainya status pencatatan BMN eks kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 provinsi; (5) Penanganan perkara, pemulihan hak-hak negara bidang kehutanan minimal menang 80% di akhir Tahun 2014; (6) Prasarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal terpenuhi 95%; (7) Meningkatnya citra positif Kemenhut sebesar 10% per tahun; (8) Standar produk dan jasa kehutanan, pedoman pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim 35 judul; (9) Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak sebanyak 3 lembaga; (10) Tersusunnya perencanaan kehutanan 4 regional; (11) Penyaluran kredit pembangunan hutan tanaman industri (HTI), hutan tanaman rakyat (HTR) dan hutan rakyat (HR) seluas 400.000 ha.

C. Pencapaian Tahun 2010 dan perkiraan pencapaian Tahun 2011

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, capaian pembangunan kehutanan difasilitasi kedalam 8 program pembangunan nasional, yang capaian-capaiannya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Penataan batas dilakukan dalam rangka pemantapan kawasan hutan, sehingga diperoleh suatu kepastian hukum atas kawasan hutan dimaksud. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi terjadinya gangguan dan tekanan terhadap kawasan hutan dari berbagai kegiatan non kehutanan.

Terkait dengan penataan ruang dalam provinsi (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/RTRWP), provinsi yang telah selesai adalah Kalimantan Selatan dan Gorontalo sedangkan 9 provinsi lainnya (Lampung, Jateng, Di. Yogyakarta, Bali, NTB, Sulsel, Jabar, Banten dan Jatim) tidak mengajukan usulan perubahan tata ruang.

Persetujuan substansi kehutanan untuk tata ruang hingga Tahun 2010 antara lain : 3 provinsi (Kalteng, Sumbar dan Sultra) telah sampai pada proses di DPR, 10 Provinsi (Kaltim, Kalbar, Riau, Kepri, Bengkulu, Jambi, Babel, Papua, Aceh dan Sumut) masih proses di Tim Terpadu, 5 Provinsi (Sulut, Sulteng, Sulbar, Maluku dan Papua Barat) masih dipersiapkan Tim Terpadu, dan 4 provinsi (Sumsel, NTT, DKI dan Maluku Utara) belum mengajukan usulan terhadap substansi kehutanan.

Terkait dengan penataan batas, hingga Tahun 2009 telah ditata batas 219.606 km (tersisa 63.267 km), sedangkan pada Tahun 2010 telah diselesaikan tata batas sepanjang 3.366 km. Pada Tahun 2011, direncanakan akan diselesaikan tata batas sepanjang 5.675 km, dengan demikian, masih tersisa sekitar 54.226 km yang menjadi target penataan batas kawasan hutan.

Upaya untuk mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan juga dilakukan dengan mendorong kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang hingga Tahun 2010 hasilnya telah ditetapkan wilayah KPHL dan KPHP di 22 provinsi (atau 530 KPHP/L) dan direncanakan pada Tahun 2011 akan ditetapkan di 3 provinsi (kumulatif 25 provinsi). Berikut dibawah ini adalah lokasi untuk KPHP dan KPHL model hingga Tahun 2010.

No	Lokasi	No	Lokasi
1	KPHP Model Mandailing Natal	15	KPHL Model Tarakan
2	KPHP Model Tasik Besar Serkap	16	KPHP Model Berau Barat
3	KPHL Model Sijunjung	17	KPHP Model Banjar
4	KPHL Model Sungai Beram Hitam	18	KPHP Model Poigar
5	KPHP Model Muko-Muko	19	KPHL Model Unit Iii Pohuwato
6	KPHP Model Sungai Sembulan	20	KPHP Model Dampelas Tinombo
7	KPHP Model Lalan	21	KPHP Model Budong Lebbo
8	KPHP Model Lakitan	22	KPHL Model Mapilli
9	KPHL Model Batu Tegi	23	KPHP Model Unit Iii Lakompa /Buton
10	KPHP Model Reg. 47 Way Terusan	24	KPHP Model Gunung Sinopa
11	KPHL Model Bali Barat	25	KPHP Model Wae Sapalewa
12	KPHL Model Rinjani Barat	26	KPHP Model Sorong
13	KPHP Model Rote Ndao	27	KPHL Model Biak Numfor
14	KPHP Model Sintang	28	KPHP Model Yapen

Sedangkan KPHK model hingga Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

No	Lokasi	No	Lokasi
1	TN. Berbak	11	TN. Bukit Duabelas
2	TN. Ujung Kulon	12	TN. Waykambas
3	TN. Gunung Halimun Salak	13	TN. Gunung Merapi
4	TN. Merubetiri	14	TN. Baluran
5	TN. Alas Purwo	15	TN. Danau Sentarum
6	TN. Bali Barat	16	TN. Gunung Palung
7	TN. Gunung Rinjani	17	TN. Laiwangi Wanggameti
8	TN. Tanjungputing	18	TN Manupeu Tanahdaru
9	TN. Kutai	19	TN. Bantimurung Bulusaraung
10	TN. Bunaken	20	TN. Bogani Nani Wartabone

KPHP dan KPHL yang telah dibangun kelembagaannya hingga Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

No	Lokasi	No	Lokasi
1	KPHL Model Sungai Beram Hitam	7	KPHL Model Rinjani Barat
2	KPHP Model Lalan	8	KPHP Model Banjar
3	KPHP Model Lakitan	9	KPHL Model Tarakan
4	KPHL Model Batu Tegi	10	KPHL Model Mapilli
5	KPHP Model Reg. 47 Way Terusan	11	KPHP Model Dampelas Tinombo
6	KPHL Model Bali Barat	12	KPHL Model Unit Iii Pohuwato

2. Peningkatan Usaha Kehutanan

Pemanfaatan sumberdaya hutan untuk mendukung pembangunan ekonomi, dilaksanakan melalui program peningkatan usaha kehutanan (program sebelumnya adalah peningkatan pemanfaatan hutan produksi). Hasil pelaksanaan program peningkatan usaha kehutanan hingga Tahun 2010 adalah perkembangan produksi kehutanan yang tercermin pada peningkatan produksi kayu dan kayu olahan, namun juga pada peningkatan kualitas produksi yang ditunjukkan oleh diterapkannya sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) serta efisiensi penggunaan bahan baku industri dan peningkatan produksi hasil hutan non kayu.

Produksi kayu pada Tahun 2010 adalah sebesar 44,15 juta m³ (meningkat sebesar 17,53% dari Tahun 2009). Produksi terbesar disumbangkan oleh IUPHHK-HTI sebesar 18,56 juta m³, berikutnya adalah IUPHHK-HA sebesar 5,12 juta m³, dan hutan rakyat sebesar 2,73 juta m³. Berikut dibawah ini adalah produksi kayu Tahun 2010.

Produksi kayu	2009 (m³)	2010 (m³)
Stok Per 31 Desember	2.763.665	2.397.049
IUPHHK Hutan Alam	4.859.647	5.120.261
IUPHHK Hutan Tanaman Industri	18.953.483	18.555.867
Penyiapan Lahan Penanaman HTI	6.123.202	13.563.641
Perum Perhutani	87.828	71.082
Izin Lainnya yang Sah/IPK	482.782	710.556
Hutan Rakyat	3.204.736	2.725.552
Kayu Perkebunan	595.461	407.332
Hasil Lelang	4.542	4.524
Pemilik atau Pedagang Hasil Hutan	252.251	180.691
IPHHK Lain	238.275	415.091
Jumlah	37.567.879	44.153.656

Sumber: Ditjen Bina Usaha Kehutanan, Kemenhut

Produksi hasil hutan kayu olahan juga mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2009 dari seluruh jenis. Peningkatan terbesar dibandingkan Tahun 2009 adalah kayu gergajian (23,27%), berturut-turut adalah sepih kayu (18,04%), *pulp* (16,02%), *plywood* dan *Laminated Veneer Lumber* (LVL) (8,04%) dan *veneer* (6,22%).

Jenis Produk Kayu Olahan	2009	2010
Plywood dan LVL (m ³)	2.995.952,54	3.236.744,62
Veneer (m ³)	684.677,91	727.286,71
Kayu gergajian (m ³)	711.509,58	877.072,85
Serpih kayu (m ³)	1.012.704,28	1.195.375,76
Pulp (ton)	4.687.038,78	5.437.724,42

Sumber: Ditjen Bina Usaha Kehutanan, Kemenhut

Selain peningkatan produk kehutanan, pemerintah juga berusaha menjaga ketersediaan kayu di hutan dan peredarannya dengan meningkatkan produksi penebangan bersertifikat legalitas kayu yang pada Tahun 2010 sebesar 10% atau setara dengan 510.000 m³, peningkatan implementasi SIPUHH secara *online* di seluruh unit manajemen IUPHHK dan IPHHK (63 unit), dan industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu yang meningkat sebanyak 11 unit.

Upaya lain yang diharapkan dapat menjaga ketersediaan kayu terutama di hutan alam adalah mendorong penggunaan bahan baku berupa kayu secara efisien dengan meningkatkan penggunaan kayu berdiameter kecil, hutan tanaman dan limbah. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pasokan dan mengimbangi kebutuhan akan kayu di Indonesia. Khusus untuk hutan tanaman, produksi pada Tahun 2010 yang masuk ke industri adalah 28,91 juta m³.

Volume ekspor produk kehutanan dalam bentuk kayu, pada Tahun 2010 sebesar 2,77 juta m³ (meningkat 1,53% dari tahun 2009) dengan nilai ekspor sebesar USD 1,49 milyar (meningkat 9,26%). Penyumbang ekspor terbesar pada Tahun 2010 adalah kayu lapis dengan volume sebesar 2,22 juta m³ dengan nilai ekspor sebesar USD 1,00 milyar, diikuti oleh moulding dan kayu pertukangan. Sedangkan produk kehutanan yang mengalami penurunan volume ekspor dari Tahun 2009 adalah papan fiber kayu (turun 37,40%), kayu pertukangan (turun 9,86%) dan bangunan prefabrikasi (turun 23,14%).

Produk	2009		2010	
	Volume (m ³)	Nilai (US\$)	Volume (m ³)	Nilai (US\$)
Kelompok kayu gergajian	46.937	25.090.385	35.883	19.666.877
Veneer	12.154	13.157.181	12.421	12.292.895
Moulding	286.065	248.364.665	315.251	283.313.7
Papan partikel	9.868	1.529.544	8.472	1.850.063
Papan fiber kayu	63.257	14.481.954	39.597	10.150.633
Kayu lapis	2.153.608	882.539.146	2.218.514	1.001.904.745
Kayu yang dipadatkan	-	-	-	-
Peti, kotak, drum, pengemas	5.494	2.376.192	5.497	2.674.160
Kayu pertukangan bahan bangunan rumah	148.414	178.795.431	133.780	163.148.291
Produk kayu lainnya	-	-	75	54.333
Bangunan prefabrikasi	2.035	2.393.063	1.564	2.282.409
Jumlah	2.727.832	1.368.727.561	2.769.616	1.495.422.341

Sumber: Ditjen Bina Usaha Kehutanan, Kemenhut

Jumlah investasi (nilai perolehan) dari pemanfaatan hutan dalam bentuk ijin usaha pemanfaatan Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dan Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) dan industri (IUPHHK) pada Tahun 2010 sebesar Rp.33,18 trilyun (naik 1,87 dari Tahun 2009). Jumlah tenaga yang terserap juga mengalami peningkatan pada Tahun 2010, yaitu sebesar 297,15 ribu orang dan 50 unit koperasi serta 87 ijin Kelompok Tani Hutan (KTH) atau meningkat 5,73%.

Komponen	Indikator					
	Investasi (nilai perolehan) (Rp Milyar)		Tenaga Kerja (orang)		Luas areal pemanfaatan (juta ha)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
IUPHHK-HA	8.357,08	7.519,54	31.058	29.105	25,66	24,95
IUPHHKA-HTI	1.677,13	2.016,09	11.990	12.941	11,97	12,17
HTR	-	-	-	(50 koperasi dan 87 ijin KTH)	-	0,99
IUPHHK-RE	-	(US\$ 7.000.000)	-	107	-	0,18
IUIPHHK	22.538,03	23.644,45	237.892	254.994	-	-
Jumlah	32.572,23	33.180,08	280.940	297.147	37,63	38,29

Sumber : Ditjen Bina Usaha Kehutanan, Kemenhut

Pemanfaatan ijin usaha pemanfaatan hutan pada Tahun 2010 meningkat sebesar 1,77% dari Tahun 2009. Hal ini dilihat dari luas kawasan hutan produksi yang dibebani ijin usaha pemanfaatan dalam bentuk IUPHHK (HA, HTI dan HTR) yang jumlahnya pada Tahun 2010 seluas 38,29 juta ha, sedangkan pada Tahun 2009 seluas 37,63 juta ha. Peningkatan terbesar disumbangkan oleh IUPHHK-HTI seluas 12,17 juta ha (atau meningkat 1,67% dari tahun 2009) dan HTR seluas 0,099 juta ha untuk 50 unit koperasi dan 87 ijin kelompok tani hutan yang telah ditetapkan oleh Bupati. Pada Tahun 2010 luas hutan tanaman (HTI dan HTR) telah ditingkatkan 457.758 ha dan pada Tahun 2011 direncanakan akan dicadangkan seluas 500.000 ha.

Pemanfaatan hutan dalam bentuk IUPHHK-HA mengalami penurunan sebesar 2,77% dari Tahun 2009. Hal ini disebabkan karena adanya penolakan permohonan ijin sebanyak 52 unit dengan luas 3,37 juta ha yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan teknis administrasi, dari total jumlah pemohon sebanyak 99 unit dengan luas 6,68 juta ha.

Terkait dengan IUPHHK-Restorasi Ekosistem, jumlah permohonan hingga Tahun 2010 sebanyak 33 unit dengan luas 3,55 juta ha. Dari jumlah itu, 11 unit dengan luas 1,71 juta ha ditolak, 17 unit dengan luas 1,65 juta ha masih dalam proses dan sebanyak 0,18 juta ha telah diterbitkan ijinnya oleh Menteri Kehutanan.

Selain peningkatan produk kehutanan, pemerintah juga berusaha menjaga ketersediaan kayu di hutan dan peredarannya dengan meningkatkan produksi penebangan bersertifikat legalitas kayu yang pada Tahun 2010 sebesar 10% atau setara dengan 510.000 m³, peningkatan implementasi SIPUHH secara *online* di seluruh unit manajemen IUPHHK dan IPHHK (63 unit), dan industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu yang meningkat sebanyak 11 unit.

Upaya lain yang diharapkan dapat menjaga ketersediaan kayu terutama di hutan alam adalah mendorong penggunaan bahan baku berupa kayu secara efisien dengan meningkatkan penggunaan kayu berdiameter kecil, hutan tanaman dan limbah. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan *supply* dan mengimbangi kebutuhan akan kayu di Indonesia. Hasilnya, pada Tahun 2010 industri hasil hutan berbahan baku diameter kecil, hutan tanaman dan limbah telah ditingkatkan

menjadi sebesar 2%. Khusus untuk hutan tanaman, produksi pada Tahun 2010 yang masuk ke industri adalah 28,91 juta m³.

3. Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan.

Program konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan dilaksanakan utamanya untuk melindungi kawasan konservasi (TN, CA, SM, TWA, TB dan Tahura), meningkatkan populasi keanekaragaman hayati melalui konservasi *in situ* dan *eks situ*, serta memanfaatkan ekosistem sumberdaya alam hayati di dalam kawasan konservasi.

Upaya melindungi kawasan konservasi dilakukan salah satunya untuk menanggulangi *illegal logging* dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL). Berbagai yang telah dilakukan yaitu operasi hutan lestari, operasi fungsional, gabungan dan rutin. Upaya-upaya tersebut telah berhasil menurunkan jumlah kasus *illegal logging*, perambahan, perdagangan TSL, penambangan ilegal dan pelaku pembakaran hutan sebesar 177 kasus dari 321 kasus di Tahun 2009. Dari jumlah kasus di Tahun 2010 itu, sebanyak 109 kasus sudah syustisi (p.1) dan kasus telah mendapatkan vonis pengadilan.

Apa penanganan kasus terkait dengan peredaran TSL dapat dicontohkan antara lain : penanganan kasus penyelundupan trenggiling di BKSDA DKI dengan hasil tersangka sebanyak 3 orang (2 orang WNI, 1 orang WNA) dengan barang bukti sisik trenggiling sebanyak 241,44 kg, dan kulit reptil, kepala kambing hutan, tanduk rusa dan penyu sisik.

Terkait dengan penanganan kawasan hutan tidak prosedural dapat dicontohkan beberapa yang ditangani di Tahun 2010 antara lain : di Sumut seluas 47.000 ha lahan disita dengan terpidana D.L. Sitorus selama 8 tahun dan denda Rp.5 milyar, di Kalteng kebun seluas 3,93 juta ha dan tambang 629 unit seluas 3.570 ha dengan taksiran kerugian sebesar Rp.158 trilyun, di Kaltim kebun seluas 333,25 ha dan tambang seluas 695.709 ha dengan taksiran kerugian sebesar Rp.21,77 trilyun. Dari beberapa kasus di atas, telah dibentuk Satgas Penanganan Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural dengan anggota Kejagung, Bareskrim Polri, KPK, Satgas Anti Mafia Hukum dan KemenLH.

Upaya untuk melindungi kawasan konservasi juga dilakukan melalui pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Capaian yang telah dilakukan adalah pembaharuan data sebaran *hotspot* secara periodik, antisipasi secara dini berdasarkan *hotspot*, peningkatan kesiagaan posko dan patrol kebakaran hutan, dan penguatan kelembagaan pengendali kebakaran hutan. Dengan didukung adanya musim hujan sepanjang tahun, telah berhasil mengurangi jumlah *hotspot* menjadi 9.765 titik *hotspot*. Luas kebakaran hutan pun berhasil dikurangi dengan realisasi hanya seluas 1.535,29 ha.

Proporsi jumlah *hotspot* berdasarkan pemantauan Tahun 2010 adalah lahan (74,5%), berturut-turut seterusnya adalah HTI (13%), HPH (6,5%), kawasan konservasi (2,9%), kebun (2,6%) dan hutan lindung (0,6%).

Upaya lain yang telah dilakukan adalah pengelolaan kawasan konservasi (*in situ*) di 50 taman nasional dan 483 kawasan konservasi lainnya (cagar alam, suaka margasatwa, taman buru dan hutan lindung). Pada Tahun 2010, telah ditetapkan 10 unit KPHK dengan pengelolaan yang diarahkan berbasis resort. Selain itu, salah satu suaka margasatwa, yaitu SM Giam Siak di Provinsi Riau telah ditetapkan sebagai Cagar Biosfer. Rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan konservasi tercapai seluas 41.719,08 ha yang tersebar di 56 UPT. Pembentukan Pokja Perambahan yang telah berhasil memetakan luas kawasan konservasi yang rusak hingga saat ini seluas 460.408 ha yang tersebar di taman nasional (yaitu seluas 316.384 ha) dan di wilayah pengelolaan BKSDA (146.870 ha).

Pengelolaan tumbuhan dan satwa liar diharapkan dapat meningkatkan populasi spesies prioritas utama dan meningkatkan pemanfaatannya. Pada Tahun 2010, telah dilakukan pembinaan habitat (peningkatan pakan, tempat berlindung dan penyediaan ruang hidup) dan populasi (monitoring jumlah, struktur umur dan *sex ratio*) untuk satwa mamalia (diantaranya harimau, gajah, banteng, badak), primata (diantaranya orangutan, bokoi, siamang), reptile (komodo, buaya, kura-kura), aves (elang jawa), ikan (arwana) dan tumbuhan (anggrek, rafflesia) di berbagai taman nasional dan kawasan konservasi lainnya. Pada Tahun 2011, diperkirakan populasi spesies prioritas utama akan meningkat sebesar 1% dari kondisi Tahun 2008.

Upaya lain yang dilakukan dalam rangka pengelolaan populasi adalah penyelamatan dan pemulihan satwa langka dilindungi, berupa pelepasliaran sejumlah satwa yaitu dua ekor harimau sumatera di Tambling Wildlife reserve, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung; 46 ekor kura-kura leher ular hasil penangkaran di Pulau Rote; dua ekor Owa Jawa di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Salak; reprivasi Badak Sumatera dari Cincinnati Zoo, Amerika Serikat; dan reprivasi dua individu Orangutan dari Vietnam dan satu individu dari Australia.

Dari pemanfaatan Tumbuhan/Satwa Liar, telah dihasilkan PNPB sebesar Rp.4,5 miliar di Tahun 2009, dan Rp.4,0 miliar di Tahun 2010 (sampai dengan November 2010). Dukungan program penyelamatan keanekaragaman hayati dilakukan melalui skema kerjasama dengan pemerintah Jerman (DNS III dan DNS VI); dan kerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat (TFCA I dan TFCA II).

Pemanfaatan kawasan konservasi sebagai wisata alam juga meningkatkan penerimaan Negara dari pungutan tiket masuk. Perolehan PNPB dari tiket masuk kunjungan wisata pada Tahun 2010 adalah sebesar Rp. 8.143.316.817,- (meningkat 8,32% dari Tahun 2009). Pemanfaatan lain dari wisata alam menunjukkan data bahwa sampai dengan saat ini terdapat 25 unit usaha pariwisata alam yang memiliki ijin (IPPA) yang tersebar pengelolaannya di 10 TN, 14 TWA dan 1 unit di Taman Buru. Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan air terdapat di 16 wilayah pengelolaan KSDA dan di 16 TN berupa irigasi, hydro-power, PLTA, PDAM, kemasan air minum dan keperluan rumah tangga.

4. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Program ini dilaksanakan untuk mengurangi lahan kritis dengan cara rehabilitasi dan penanaman. Upaya ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi dan keseimbangan ekosistem kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan.

Beberapa capaian pada Tahun 2010 adalah telah dibangun 7.460 kebun bibit rakyat (373.000.000 batang) yang akan ditanam pada Tahun 2011, dan pembangunan hutan kota seluas 1.055 ha. Pada Tahun 2011, direncanakan akan dibangun 10.000 KBR dan hutan kota seluas 2000 ha. Upaya ini diharapkan dapat

meningkatkan rasio tutupan hutan terhadap lahan kritis di Indonesia. Selain itu pada Tahun 2010 telah direhabilitasi seluas 85.307 ha. Distribusi setiap provinsi yang didekati di setiap unit kerja BPDAS, sebagai berikut :

No	BPDAS	Hutan Kota (Ha)	Konservasi/Lindung (Ha)	KBR (unit)
1	Krueng Aceh	20	1.500	266
2	Wampu Sei Ular	10	2.000	322
3	Asahan Barumon	15	1.180	375
4	Agam Kuantan	89	2.687	93
5	Indragiri Rokan	70	6.000	242
6	Kepulauan Riau	20	900	46
7	Batanghari		90	34
8	Ketahun	4	5.000	78
9	Musi	85,5	1.530	160
10	Baturusa Cerucuk	50	0	29
11	Way Seputih Sekampung	50	7.500	353
12	Citarum Ciliwung	18	6.679	200
13	Cimanuk Citanduy	20	4.285	171
14	Pemali Jratun	10	2.574,6	395
15	Solo	10	675	324
16	Serayu Opak Progo	-	3.603	240
17	Brantas	15	1.588	279
18	Sampean	10	1.000	204
19	Kapuas	73	5.400	316
20	Kahayan	72	7.750	53
21	Barito	24	4.000	240
22	Mahakam Berau	79	1.900	198
23	Unda Anyar	-	636	87
24	Dodokan M	15	1.000	236
25	Benain Noelmina	25	975	552
26	Tondano	20	1.400	212
27	Palu Poso	20	1.000	170
29	Bone Bolango	25	1.254	88
30	Jeneberang Walanae	15	3.150	455
31	Saddang	15	1.000	213
32	Sampara	15	2.150	220

No	BPDAS	Hutan Kota (Ha)	Konservasi/Lindung (Ha)	KBR (unit)
33	Lariang Mamasa	14	1.000	176
34	Waehapu Batu Merah	55	1.000	98
35	Ake Malamo	19	1.000	88
36	Memberamo	62	1.000	119
37	Remu Ransiki	10	900	128
J U M L A H		1.055	85.307	7.460

Upaya untuk mengurangi bencana terutama terkait dengan banjir dan tanah longsor, telah dilakukan komunikasi para pihak di lingkungan DAS dan membangun rencana pengelolaan DAS dengan target 108 DAS hingga 2014. Pada Tahun 2010, telah disusun rencana pengelolaan 21 DAS prioritas dan pada Tahun 2011 diperkirakan 22 rencana pengelolaan DAS terpadu akan disusun. Pada Tahun 2011 juga akan dilaksanakan pembangunan areal sumber benih seluas 1.100 ha dan pengelolaan areal sumber benih seluas 4.500 ha.

Upaya lain yang diharapkan dapat meningkatkan rasio penutupan hutan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan, pada Tahun 2010 telah difasilitasi penetapan areal kerja hutan rakyat kemitraan seluas 50.000 ha, hutan kemasyarakatan 400.000 ha dan hutan desa 100.000 ha. Penetapan areal kerja ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk dapat memfasilitasi pemberian akses pemanfaatan hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2011, diperkirakan akan dilakukan rehabilitasi seluas 500.000 ha, fasilitasi penetapan HKm seluas 400.000 ha, fasilitasi penetapan areal kerja HD seluas 100.000 ha dan fasilitasi pembangunan HR kemitraan seluas 50.000 ha.

Dalam rangka meningkatkan keragaman produk kehutanan, revitalisasi kehutanan juga diarahkan untuk meningkatkan produk kehutanan bukan kayu (HHBK). Jenis-jenis HHBK yang telah ditetapkan sebagai unggulan adalah sutera alam, rotan, bambu, lebah madu, gaharu dan nyamplung. Jenis HHBK berupa sutera alam selama Tahun 2005-2009 telah memproduksi kokon sebesar 1.662.620,30 kg (atau 332.524,06 kg/tahun) dan benang sebesar 231.763,76 kg

(atau 46.352,75 kg/tahun). Jenis HHBK yang lain juga akan ditingkatkan produksinya dengan melakukan intervensi kebijakan dan pemberian insentif bagi pelaku utama (masyarakat) dan pelaku usaha sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan nasional.

5. Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

Capaian Tahun 2010 dari program terkait Litbang Kemenhut adalah :

- a. Dukungan terhadap upaya rehabilitasi dan penanaman, antara lain : (1) Perbanyak bibit tanaman dengan KOFFCO sistem, sebuah teknik produksi bibit berkualitas secara masal dengan stek pucuk (tanpa tergantung musim buat). Teknik ini sudah diadopsi dan dimanfaatkan perusahaan HTI; (2) Jenis unggulan mangium, ekaliptus dan kayu putih hasil pemuliaan; (3) Aplikasi mikoriza, salah satu alternatif teknologi untuk meningkatkan survival, serapan nutrisi dan pertumbuhan bibit di lapangan serta menghemat pemakaian pupuk; (4) Pengendalian hama kutu lilin pada pinus; (5) Pengendalian penyakit karat tumor pada sengon; (6) Sidik cepat degradasi sub DAS, teknik dalam identifikasi menggunakan formula skoring, peta dan pengamatan lapangan. Teknik ini diharapkan dapat digunakan dalam pengendalian banjir dan tanah longsor dengan menggunakan teknik sipil, vegetatif, kimiawi maupun kombinasi dari ketiganya; (7) Peta kesesuaian jenis pohon dan lahan untuk rehabilitasi hutan dan lahan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa dan Papua; (8) Mikrohydro elektrik; (9) Inang krokot untuk budidaya cendana.
- b. Dukungan terhadap pengembangan industri kehutanan, antara lain : (1) Teknologi pemanfaatan batang sawit, dengan memodifikasi senyawa kimia dan memadatkan struktur kayu sawit agar kompatibel dengan kayu pertukangan lainnya; (2) Teknologi pengolahan bambu lamina, berupa papan bambu yang dihasilkan dari proses laminasi bilah-bilah bambu; (3) Rekayasa alat pengering kayu dengan kombinasi tenaga surya dan tungku yang hemat energi dan ramah lingkungan; (4) Pengawetan kayu, yang dapat memperpanjang umur penggunaan kayu sampai 15 tahun; (5) Perekat tanin, dari bahan baku kulit kayu mangium dan dapat menggantikan perekat impor.
- c. Dukungan terhadap pengembangan HHBK, antara lain : (1) Biodiesel nyamplung; (2) Teknologi produksi gaharu, menggunakan teknik pembentukan gaharu dengan inokulasi isolat jamur (inokulan penginfeksi batang pohon gaharu untuk mendorong terbentuknya oleoresin); (3) teknologi peningkatan produktifitas dan kualitas madu; (4) teknologi peningkatan produktifitas dan kualitas sutera; (5) media budidaya jamur shitake dan jamur tiram dengan menggunakan serbuk gergaji; (6) penangkaran rusa

timor dengan menggunakan sistem kandang terbuka (*mini ranch*) dan kandang tertutup sistem pembesaran; (7) pengembangan sumber bahan pewarna alami sebagai tinta sidik jari Pemilu.

6. Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

Capaian pada program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam pembangunan kehutanan. Beberapa capain terkait peningkatan kapasitas masyarakat yang dilakukan melalui penyuluhan kehutanan adalah terselenggaranya kegiatan pengembangan model dan percontohan pemberdayaan masyarakat lokal sebanyak 14 kelompok (Tahun 2009 dilakukan terhadap 10 kelompok) dan pengembangan usaha produktif sebanyak 10 kelompok (jumlah kelompok usaha produktif mandiri pada Tahun 2009 telah mencapai 66 kelompok, kumulatif menjadi 76 kelompok) dan pengembangan percontohan pemberdayaan masyarakat di 10 lokasi. Capaian lain terkait dengan kegiatan penyuluhan adalah pengembangan sentra penyuluhan kehutanan pedesaan di 100 lokasi.

Pada Tahun 2011, direncanakan akan dibentuk 100 kelompok masyarakat produktif mandiri, peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pemberdayaan masyarakat sebanyak 2 kerjasama.

Terkait dengan peningkatan kapasitas penyuluh, pada Tahun 2011 akan disertifikasi sebanyak 200 orang dan pembentukan lembaga koordinasi penyuluhan di tingkat provinsi sebanyak 1 provinsi dan 5 lembaga koordinasi penyuluhan di tingkat kabupaten/kota.

Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur, dilakukan kegiatan Diklat yang pada Tahun 2010 telah dilaksanakan sebanyak 4.679 orang, terdiri atas diklat aparatur (pra jabatan, teknis dan kepemimpinan) dan diklat non aparatur. Pada Tahun 2011 direnakan akan dilaknakan Diklat sebanyak 3.000 orang, dan 570 siswa dalam penyelenggaraan SMK Kehutanan. Berikut dibawah ini adalah komposisi Diklat yang dilaksanakan Tahun 2010.

No.	Jenis/Bidang Diklat	Peserta (Org)
I.	Diklat Aparatur	4.020
A.	Pra Jabatan	923
1.	Diklat Pra Jabatan Honorer Gol. I & II	393
2.	Diklat Pra Jabatan Honorer Gol. III	530
B.	Diklat Kepemimpinan	170

No.	Jenis/Bidang Diklat	Peserta (Org)
1.	Diklat Kepemimpinan Tk. II	10
2.	Diklat Kepemimpinan Tk. III	40
3.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	120
C.	Diklat Teknis	2.231
1.	Perencanaan Hutan	475
2.	Pemanfaatan Hutan	111
3.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	512
4.	KSDA Hayati dan Ekosistemnya	550
5.	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	148
6.	Administrasi	435
D.	Diklat Fungsional	696
1.	Pengendali Ekosistem Hutan	206
2.	Penyuluh Kehutanan	160
3.	Polisi Kehutanan	330
4.	Guru	42
II.	Diklat Non Aparatur/Masyarakat	629
	Jumlah Peserta	4.679

Kerjasama dalam penyelenggaraan Diklat juga dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat, antara lain dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah. Berikut ini adalah daftar kerjasama Diklat Tahun 2010.

No.	Kerja sama	Diklat
1.	Unit Es- I dan II Lingkup Dephut	Diklat keteknisan Unit Es-I Dephut : Ditjen Bina Produksi Kehutanan, Ditjen RLPS, serta Diklat auditor Itjen . Unit Es-II : Pusbinluh
2.	Dinas/Intansi Kehutanan pada Pemda	Pemkot/Pemkab Makassar. Jawa Barat, Jawa Tengah, Balai Diklat Jawa Barat, Balai Diklat Prop. Jateng
3.	Lembaga Non Pemerintah	RECOFTC • Diklat ToT REDD dan Diklat Technique Participatory and Design KOICA (Korea) • Penempatan tenaga ahli bidang konservasi JICA (Jepang)

No.	Kerja sama	Diklat
		<ul style="list-style-type: none"> • Training Need Assessment DED (Jerman) • Diklat SIG dan GPS CIM (Jerman) • Penempatan tenaga ahli bidang KPH ITTO • Diklat pengembangan Industri rumah tangga MFP • Diklat Upgrading Penilaian Kinerja PHPL

7. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan

Dalam rangka membangun penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang mampu mendorong pencapaian target pembangunan yang dirumuskan, telah dilakukan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Audit pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diharapkan dapat mendorong pencapaian kinerja terhadap penyelenggaraan pembangunan kehutanan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam penyelesaian permasalahan kehutanan.

Pada Tahun 2010, telah dilaksanakan audit reguler sebanyak 262 kali, audit khusus sebanyak 25 kali dan pemantauan tindak lanjut saran hasil audit. Hasilnya pada Tahun 2010 ditemukan kelemahan administrasi (kelemahan tata usaha/akuntansi) sebanyak 465 (23,59%), pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 140 (7,10%), hambatan terhadap kelancaran tugas pokok sebanyak 269 (13,65%), dan kejadian yang merugikan negara sebanyak 142 (7,20%).

Direncanakan pada Tahun 2011, akan diselenggarakan 240 audit reguler dan 25 kali audit khusus, 41 review atas laporan keuangan dan 25 kali identifikasi khusus serta pengumpulan bahan dan keterangan.

Diharapkan pada Tahun 2011, kelemahan administrasi di wilayah kerja ditekan hingga 20% dari Tahun 2009, pelanggaran terhadap peraturan perundangan berkurang hingga 20% dari Tahun 2009, dan hambatan kelancaran pelaksanaan tugas berkurang hingga 20% dari Tahun 2009, serta potensi kerugian negara dapat diturunkan hingga 10% dari temuan Tahun 2006-2009.

8. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, yang capaiannya antara lain peningkatan perencanaan, peningkatan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, penguatan legislasi bidang kehutanan, dan peningkatan kinerja aparatur. Upaya ini juga didukung peningkatan kapasitas lembaga pengelola kawasan hutan yang terdiri atas pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Peningkatan perencanaan dilakukan dengan merestrukturisasi program dan kegiatan sesuai kerangka pembiayaan jangka menengah, dan peningkatan kapasitas pemerintah provinsi dalam bentuk alokasi dana dekonsentrasi dan DAK untuk pemerintah kabupaten/kota.

Pada Tahun 2010 telah didistribusikan dana dekonsentrasi Tahun 2010 sebesar Rp.106,876 milyar dan pada Tahun 2011 meningkat menjadi Rp.167,969 milyar. Sedangkan DAK pada Tahun 2010 sebesar Rp 250 milyar, dengan jumlah Kabupaten/Kota penerima DAK Kehutanan sebanyak 232 Kab/Kota. Jumlah ini meningkat dibandingkan Tahun 2008 dan 2009 masing-masing adalah Rp. 100 milyar.

Terkait dengan peningkatan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, telah disusun regulasi pengelolaan keuangan. Upaya ini diikuti dengan peningkatan kapasitas pengelola keuangan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan dalam aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (terdiri atas Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Manajemen Barang Milik Negara) di setiap satuan kerja Kemenhut.

Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenhut, upaya yang telah dilakukan adalah penggalan sumber-sumber PNBP dari peningkatan produksi kayu kehutanan dan jasa lingkungan. Hasilnya, pada Tahun 2010, jumlah PNBP meningkat menjadi Rp. 2,6 Trilyun (per 30 November 2010).

Terkait dengan penguatan legislasi bidang kehutanan, selama periode Tahun 2005-2009 telah diselesaikan 1 (satu) buah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, serta 5 produk Peraturan Pemerintah (PP) di bidang kehutanan, yaitu PP No. 6 Tahun 2007, PP No. 58 Tahun 2007, PP No. 3 Tahun 2008, PP No. 76 Tahun 2008, PP No. 60 Tahun 2010, PP No. 10 Tahun 2010, PP No. 36 Tahun 2010 dan PP No. 72 Tahun 2010.

Selain itu, dihasilkan pula 337 produk dalam bentuk Peraturan Menteri Kehutanan dan 126 buah produk dalam bentuk Keputusan Menteri Kehutanan.

Regulasi di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sampai dengan Tahun 2010 adalah revisi UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, penyempurnaan PP No. 68 Tahun 1998 tentang KSA dan KPA, penerbitan PP 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, Tahura dan TWA, penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P. 17/Menhut-II/2010 tentang Permohonan, Pemberian dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru, dan mengerjakan program Reformasi Birokrasi Jangka Pendek "Quick Wins" pada Setditjen PHKA berupa penyempurnaan perizinan masuk kawasan konservasi bagi warga negara asing.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendorong kinerja aparatur dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Kemenhut, Sekretariat Jenderal telah memberikan penghargaan dalam bentuk kenaikan pangkat pegawai. Pada periode Tahun 2005-2010 telah dilakukan kenaikan pangkat bagi 17.711 orang, yang gambaran tiap tahunnya adalah : Tahun 2005 sebanyak 2.144 orang, Tahun 2006 sebanyak 3.483 orang, Tahun 2007 sebanyak 2.623 orang, Tahun 2008 sebanyak 3.197 orang, Tahun 2009 sebanyak 2.405 orang dan Tahun 2010 sebanyak 3.859 orang.

Pemberian penghargaan dalam bentuk tanda jasa juga telah diberikan kepada PNS selama periode Tahun 2005-2010, yaitu kepada 7.819 orang berupa : penghargaan Satya Lencana Karya Satya sebanyak 5.521 orang, Purna Karya sebanyak 2.298 orang dan penghargaan kepada pembina pramuka dalam bentuk tanda kecakapan Lencana Melati sebanyak 1 orang.

Dalam upaya untuk mendapatkan PNS yang memiliki kompetensi manajerial dan teknis yang memadai untuk menduduki jabatan struktural, selama Tahun 2005-2010, Setjen telah melaksanakan *Personnel Assessment Center* (PAC) sebanyak 2006 orang dengan rincian untuk calon pejabat Eselon II sebanyak 192 orang, untuk calon pejabat Eselon III sebanyak 214 orang dan calon pejabat Eselon IV sebanyak 1.600 orang. Demikian juga untuk mengisi kekurangan pegawai Kemenhut, selama Tahun 2005-2010, Setjen telah melakukan rekrutmen CPNS sebanyak 5.105 orang dengan rincian Tahun 2005 sebanyak 960 orang, Tahun 2006 sebanyak 587 orang, Tahun 2007 sebanyak 617 orang, Tahun 2008 sebanyak 587 orang, Tahun 2009 sebanyak 1.215 orang dan Tahun 2010 sebanyak 613 orang.

Selanjutnya, untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap usaha ekonomi di bidang kehutanan termasuk aspek permodalannya, pada Tahun 2007 dibentuk BLU untuk memberikan fasilitasi kelembagaan serta permodalan kepada masyarakat dalam pengembangan HTI, HTR dan HR. Fasilitasi dana yang disediakan Tahun 2008 sebesar Rp.1,4 trilyun dan untuk Tahun 2009 ditingkatkan menjadi sebesar Rp.1,7 trilyun.

Upaya pengembangan HTI/HTR/HR melalui Badan Layanan Umum (BLU) ini diikuti dengan pendampingan yang dimulai dengan penguatan kapasitas pendamping dan pemberian pelatihan pendampingan untuk pembangunan HTI/HTR/HR. Sampai dengan Tahun 2009 telah diberikan pelatihan pendampingan di 9 Provinsi dengan jumlah peserta 215 orang bagi penyuluh kehutanan/pendamping yang berasal dari 47 kabupaten.

II. PERMASALAHAN, KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN TAHUN 2012

A. Permasalahan

Permasalahan pembangunan kehutanan diidentifikasi adalah : (1) masih tingginya gangguan keamanan hutan dalam bentuk penebangan liar, perdagangan TSL illegal yang mengakibatkan penurunan potensi penerimaan PNBP ; (2) masih belum memadainya produksi HTI, HTR dan HR untuk memenuhi kebutuhan kayu nasional; (3) masih rendahnya efisiensi industri, terutama dalam pemanfaatan limbah dan kayu berdiameter kecil, hal ini mengakibatkan eksploitasi sumberdaya hutan yang berlebihan; (4) tumpang tindih kawasan hutan yang menyebabkan berkurangnya minat investasi terhadap ijin usaha pemanfaatan hutan; (5) kondisi kawasan yang belum tertata dalam wilayah-wilayah pengelolaan; (6) aktifitas pemulihan kawasan yang masih rendah menyebabkan masih luasnya lahan kritis; dan (7) belum sinerginya antara kebijakan dengan hasil-hasil litbang kehutanan.

B. Kebijakan Penganggaran dan Penguatan APBN

Dalam rangka peningkatan kualitas penganggaran dan penguatan APBN, Kemenhut pada Tahun 2012 berusaha untuk :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan APBN, yang dilakukan dengan:
 - (a) Meningkatkan percepatan penyelesaian permasalahan utama/kondisi pemungkin (*enable conditions*) pembangunan kehutanan, yang dilakukan melalui inisiatif baru;
 - (b) Memberikan prioritas pendanaan bagi kelompok sasaran yang merupakan target pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014; dan,
 - (c) Memantapkan restrukturisasi program dan kegiatan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluaran dan akuntabilitas program dan kegiatan sesuai dengan hasil pelaksanaan tugas fungsi yang dijalankan setiap tingkatan unit kerja.
2. Menggali pendanaan dari negara dan lembaga donor internasional, utamanya terhadap kemungkinan hibah untuk membiayai program dan kegiatan yang merupakan isu dan prioritas nasional, seperti perubahan iklim.
3. Menggali kemungkinan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait dengan kehutanan, seperti pemanfaatan jasa lingkungan dan sumberdaya air.

C. Sasaran Pembangunan Tahun 2012

Dalam rangka meningkatkan percepatan penyelesaian permasalahan kehutanan, pada Tahun 2012 telah ditambahkan target pembangunan khususnya kegiatan pengukuhan kawasan hutan dan pembangunan KPH. Keduanya diberikan tambahan anggaran melalui inisiatif baru.

Pengukuhan kawasan hutan yang awalnya akan direncanakan di dalam Renstra Kemenhut Tahun 2010-2014 sepanjang 4.000 km menjadi sepanjang 16.000 km. Berikut ini adalah perubahan *base line* untuk tata batas.

Output/ Indikator Output	Target Sebelum Inisiatif Baru (km)			Target Sesudah Inisiatif Baru (km)		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Terwujudnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan						
• Tata batas kawasan hutan	4.000 (kumulatif 12.000)	6.000 (kumulatif 18.000)	7.000 (kumulatif 25.000)	16.000 (kumulatif 24.000)	15.000 (kumulatif 39.000)	24.000 (kumulatif 63.000)

Perubahan *base line* capaian untuk pembangunan KPH, disajikan sebagai berikut :

Output/Indikator Output	Target Sebelum Inisiatif Baru (unit)			Target Sesudah Inisiatif Baru (Unit)		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Terwujudnya kepastian wilayah kelola KPH dan penyiapan areal pemanfaatan hutan						
• KPH beroperasi sebanyak 120 unit (20% dari KPH yang telah ditetapkan)	-	-	-	60	30 (kumulatif 90)	30 (kumulatif 120)

Lebih lanjut, sasaran pembangunan kehutanan Tahun 2012 adalah :

1. Tata batas kawasan hutan sepanjang 16.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan.

2. Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di seluruh provinsi dan beroperasinya 60 KPH (10% wilayah KPH yang telah ditetapkan)
3. Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 1 judul
4. Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 500.000 ha
5. Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (*Logged over area/LOA*) seluas 450.000 ha
6. Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 10%
7. Jumlah *Hotspot* kebakaran hutan menurun 48,8%, dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, *illegal logging* dan *wildlife trafficking* sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya hutan.
8. Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 1,5% dari kondisi Tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat.
9. Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 36 DAS prioritas.
10. Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 399.000 ha
11. Terbangunnya Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 400.000 ha.
12. Terbangunnya Hutan Desa Seluas 100.000 ha.
13. Penyediaan keteknikan kehutanan dan pengelolaan hasil hutan, produktifitas hutan, konservasi dan rehabilitasi, serta perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 60%
14. Terbentuknya 12 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat.
15. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya minimal sebanyak 3.000 orang.
16. Penanganan perkara, pemulihan hak-hak Negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 48%.
17. Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan "wajar tanpa pengecualiaan" mulai laporan keuangan Tahun 2011
18. Kelemahan administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan diturunkan sampai 30%, serta potensi kerugian Negara diturunkan hingga 15%.

III. RENCANA KERJA TAHUN 2012

A. Posisi Pembangunan Kehutanan Terhadap Pembangunan Nasional

Prioritas pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu II, menempatkan pembangunan kehutanan pada prioritas ke 9 yaitu Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Substansi inti yang terkait dengan pembangunan kehutanan adalah : (1) Perubahan Iklim, dengan indikator peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 ha per tahun, dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana IHPH, PSDH dan DR; (2) Pengendalian kerusakan lingkungan, dengan indikator Penurunan jumlah *hotspot* kebakaran hutan sebesar 20% per tahun, penghentian kerusakan lingkungan di 11 DAS yang rawan bencana mulai Tahun 2010 dan seterusnya; dan (3) Penanggulangan bencana, dengan indikator peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam usaha pengurangan bahaya kebakaran.

Terkait dengan prioritas pembangunan bidang, sektor kehutanan termasuk pada Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan hidup, yang komposisi kegiatan di setiap fokus prioritasnya adalah : (a) Ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, dengan fokus prioritas : (1) Peningkatan produksi dan produktifitas untuk menjamin ketersediaan pangan dan bahan baku industri dari dalam negeri, (2) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan pemasaran produk pertanian, perikanan dan kehutanan, (3) Peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan; dan (b) Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hutan, dengan fokus prioritas : (1) Perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan, (2) Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan, (3) Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, (4) Penelitian dan pengembangan Kemenhut.

Untuk memenuhi target di atas, kegiatan dan indikatornya pada prioritas nasional pada pembangunan kehutanan Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas	Indikator	Keterangan		
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 100.000 ha.	Pelaksanaan penanaman melalui kegiatan Perencanaan, penyelenggaraan RHL, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS)		
		Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 399.000 ha.			
		Terjaminnya hutan kota seluas 1.000 ha.			
	Pengembangan Perhutanan Sosial	Terjaminnya hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 400.000 ha		Pelaksanaan penanaman melalui kegiatan Perencanaan, penyelenggaraan RHL, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS)	
		Terjaminnya ijin usaha pengelolaan HKm sebanyak 100 kelompok			
		Terjaminnya kemitraan usaha HKm sebanyak 10 unit			
		Terjaminnya dukungan ketahanan pangan di 6 provinsi			
		Terjaminnya hutan rakyat Kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 50.000 Ha			
		Terjaminnya sentra HHBK Unggulan terbentuk dan beroperasi di 6 lokasi			
	Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS	Terjaminnya rencana pengelolaan DAS terpadu di 36 DAS prioritas			Pelaksanaan melalui kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional, dan Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumberdaya Alam)
		Terjaminnya base line data pengelolaan DAS di 36 DAS			
	Pengendalian kebakaran hutan	Terjaminnya hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 48,8% dari rerata 2005-2009			
Terjaminnya kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 30% dibanding kondisi rerata 2005-2009					
Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 6 DAOPS					

Sedangkan posisi kegiatan pembangunan kehutanan Tahun 2012 pada prioritas Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan hidup, adalah sebagai berikut :

Prioritas	Fokus Prioritas	Kegiatan	
Ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan	Peningkatan produksi dan produktifitas untuk menjamin ketersediaan pangan dan bahan baku industri dari dalam negeri	Peningkatan usaha hutan tanaman kehutanan	
		Peningkatan usaha hutan alam	
		Perencanaan pemanfaatan dan peningkatan usaha kawasan hutan	
		Peningkatan usaha industri primer kehutanan	
		Peningkatan usaha kehutanan dan pembinaan Ganis Wasganis PHPL	
	Peningkatan nilai tambah, daya saing dan pemasaran produk pertanian, perikanan dan kehutanan	Peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan	Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan
			Penelitian dan pengembangan keteknikan hutan dan pengelolaan hutan
			Penelitian dan pengembangan produktifitas hutan
	Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hutan	Perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan	Pengukuhan kawasan hutan
			Pembangunan KPH
			Penyusunan rencana makro kawasan hutan
			Inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan
Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan			
Penyiapan pemantapan kawasan hutan			
Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hutan	Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan	Pengembangan kawasan konservasi, ekosistem esensial dan pembinaan hutan lindung	
		Penyidikan dan pengamanan hutan	
		Pengembangan konservasi spesies dan genetik	
		Pengendalian kebakaran hutan	
		Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan	
		Pengembangan dan pengelolaan taman nasional	
		Pengembangan pengelolaan konservasi sumberdaya alam	
Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat	Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	
		Pengembangan Perhutanan Sosial	
		Pengembangan perbenihan tanaman hutan	
		Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS	
		Perencanaan, penyelenggaraan RHL,	

Prioritas	Fokus Prioritas	Kegiatan
		pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS
		Perencanaan, pengembangan kelembagaan dan evaluasi hutan mangrove
		Penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan
		Pengembangan Persuteraan Alam
	Penelitian dan pengembangan Kmenhut	Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan
		Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi

B. Program, Kegiatan dan indikator Kinerja Tahun 2012

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kemenhut pada Tahun 2012 adalah :

1. Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan
 - a. Penguksuhan Kawasan Hutan, yang memiliki *output* terwujudnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan. IKK yang akan dicapai adalah : (1) Terjaminnya tata batas kawasan hutan sepanjang 16.000 Km terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan; (2) Penunjukkan kawasan hutan provinsi selesai (100%); (3) Penetapan kawasan hutan yang telah di tata batas temu gelang selesai 75%; (4) Rekomendasi fungsi kawasan hutan selesai 75%; (5) SK pelepasan kawasan hutan secara parsial selesai 75%.

Dimensi Kewilayahan Tata Batas 16.000 km Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Provinsi	Target (km)	Provinsi	Target (km)	Provinsi	Target (km)
Aceh	500	Banten	178	Sulsel	100
Sumut	1.000	Jateng	40	Sultra	300
Sumbar	500	Jatim	200	Sulbar	100
Sumsel	400	Yogyakarta	30	Maluku	1.000
Bengkulu	400	NTT	500	Papua	1.500
Lampung	400	Kalbar	1.000	Gorontalo	700
Riau	200	Kalteng	1.100	Sulteng	700
Kepri	500	Kalsel	400	Papua Barat	1.000
Jambi	250	Kaltim	2.000		
Babel	250	Sulut	200		
Jabar	250	Malut	300		

- b. Pembangunan KPH. *Output* yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya kepastian wilayah kelola KPH dan penyiapan areal pemanfaatan hutan. IKK dari kegiatan ini antara lain: (1) Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah KPHL dan KPHP di seluruh Indonesia 28 provinsi, (2) Beroperasinya 60 KPH (10% dari KPH yang ditetapkan) (3) Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah KPHK di seluruh Indonesia 60%, (4) Peraturan Perundangan tentang penyelenggaraan KPH sebanyak 1 judul, dan (5) Peta areal kerja dan peta pencadangan ijin pemanfaatan hutan selesai 50%. Dimensi Kewilayahan Beroperasinya 60 unit KPH Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Provinsi	Lokasi	Provinsi	Lokasi
Sumatera Utara	KPHP Madina	Kalimantan Timur	KPHL Tarakan
	KPHL Asahan		KPHP Berau Barat
Sumatera Barat	KPHP Kuantan		KPHP Kutai Timur
	KPHL Limapuluh Kota		KPHP Malinau
Sumatera Selatan	KPHP Lalan Mendis	Kalimantan Selatan	KPHP Banjar
	KPHL Lakitan		KPHP Tanah Laut
	KPH Pagar Alam		KPHP Pulau Laut
Bengkulu	KPHP Muko-muko	Kalimantan Tengah	KPHL Kapuas
Lampung	KPHP Way Terusan		KPHP Gunung Bondang, Murung
	KPHL Batu Tegi	Sulawesi Utara	KPHP Poigar
	KPHP Gedong Wani	Maluku Utara	KPHP Gunung Sinopa
	KPHP Muara Dua	Sulawesi Selatan	KPHP Jeneberang
	KPHL Kota Agung Utara	Sulawesi Tengah	KPHP Dampelas Tinambo
	Kalimantan Barat		KPHP S. Merakai Sintang
KPHL Kapuas		Papua	KPHP Yapen

	Hulu		
	KPHP Ketapang		KPHL Biak Numfor
Sulawesi Barat	KPHP Budong Lebbo	DI. Yogyakarta	KPH Yogya
	KPHL Mapili	Riau	KPHP Tasik Besar Serkap
	KPHL Lariang		KPHP Tebing Tinggi
	KPHP Mamasa Barat		KPHP Kampar Kiri
	KPHL Mamasa Tengah	Kepri	KPH Karimun
Sulawesi Tenggara	KPHP Lakomba Buton	Babel	KPHP S.Sembulan
	KPHP Konawe Selatan	Jambi	KPHP Bram Hitam
Bali	KPHL Bali Barat		KPHP Merangin
	KPHL Bali Tengah		KPHP Sarolangun
	KPHL Bali Timur	NTT	KPHP Rote Ndao
NTB	KPHL Rinjani Barat		KPHL Timor Tengah
		KPHL Lombok Timur	Gorontalo
Maluku	KPHP Wae Sapalewa		KPHP Boalemo
Papua Barat	KPHP Sorong		

- c. Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan. *Output* dari kegiatan ini adalah terselenggaranya perencanaan, harmonisasi tata ruang dan sistem jaringan komunikasi data yang tepat dalam mendukung pematapan kawasan hutan. IKK dari kegiatan ini adalah : (1) Rencana makro penyelenggaraan kehutanan sebanyak 1 judul, (2) Persetujuan substansi teknis kehutanan terhadap usulan revisi tata ruang di 26 provinsi selesai 80%, dan (3) Sistem jaringan komunikasi data kehutanan LAN pusat dan WAN 17 provinsi sebanyak 1 sistem per tahun.

- d. Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan. *Output* dari kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi sumberdaya hutan seluruh Indonesia yang akurat dan terkini. IKK dari kegiatan adalah: (1) Data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 1 judul, (2) Data dan informasi sumberdaya hutan pada kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 1 judul, (3) Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 1 judul, dan (4) Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 1 kali update. *Outputnya* adalah tersedianya data dan informasi sumberdaya hutan seluruh Indonesia yang akurat dan terkini.
- e. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Kegiatan ini memiliki *output* terwujudnya penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi, peruntukan dan peraturan yang berlaku. IKK dari kegiatan ini adalah: (1) Ijin pinjam pakai kawasan hutan terlayani 100% secara tepat waktu, (2) Wajib bayar tertib membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%, (3) Data dan informasi penggunaan kawasan hutan di 6 provinsi, dan (4) Peraturan perundangan penggunaan kawasan hutan, 1 judul.
- f. Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan. Kegiatan ini berada di UPT BPKH seluruh Indonesia, yang secara operasional digunakan untuk memfasilitasi capaian kinerja dari masing-masing direktorat lingkup Ditjen Planologi Kehutanan. *Output* dari kegiatan ini adalah terwujudnya kepastian kawasan hutan dalam mendukung pemantapan kawasan hutan. IKK dari kegiatan ini adalah: (1) Tata batas kawasan hutan sepanjang 16.000 km, (2) Neraca Sumberdaya Hutan di 17 BPKH, (3) Tersedianya Sarpras dan tata hutan KPH 60 unit, (4) Enumerasi dan re-Enumerasi TSP/PSP 599 Plot.
- g. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan. Kegiatan ini memiliki *output* penyelenggaraan tugas fungsi Ditjen Planologi Kehutanan berjalan secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun di unit daerah, dan menjadi bagian untuk mewujudkan reformasi birokrasi. IKK dari kegiatan ini adalah: (1) Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 23 satker, (2) Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut "wajar tanpa pengecualian" mulai laporan keuangan Tahun 2011 sebanyak 23 satker.

2. Peningkatan Usaha Kehutanan

- a. Peningkatan Usaha Hutan Tanaman, kegiatan ini memiliki *output* peningkatan produksi hutan tanaman dari HTI/HTR. IKK dari kegiatan ini adalah : (1) Penambahan luas areal pencadangan izin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 500.000 Ha, (2) Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 500.000 Ha, (3) Sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari minimal pada 10 unit manajemen hutan tanaman.
- b. Peningkatan Usaha Hutan Alam. *Output* dari kegiatan ini adalah peningkatan produksi dan diversifikasi usaha hutan alam, dengan IKK adalah: (1) Peningkatan produksi hasil hutan kayu sebesar 1%, sehingga secara kumulatif produksi hasil hutan akan meningkat sebesar 3% dari target 5% pada Tahun 2014; (2) Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 10% sehingga secara kumulatif meningkat menjadi 30% dari target 50% pada Tahun 2014; (3) 30% produksi penebangan bersertifikat Legalitas Kayu.
- c. Perencanaan Pemanfaatan dan Peningkatan Usaha Kawasan Hutan. Kegiatan ini memiliki *output* areal hutan produksi tertata baik dalam KPHP maupun unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi. IKK dari kegiatan ini adalah : (1) Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan produksi 60%, (2) Tersedianya areal calon /usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha 60% pada 26 provinsi, (3) Produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 1%, (4) Penerbitan IUPHHK-JA/RE pada areal bekas tebangan (LOA) seluas 450.000 Ha.
- d. Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan, yang memiliki *output* penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan tertib sesuai ketentuan yang berlaku. IKK untuk memenuhi *output* kegiatan ini adalah PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 2% dan implementasi SIM PUHH secara *on line* di seluruh unit manajemen IUPHHK dan IPHHK sebesar 60%.
- e. Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja industri pengolahan hasil hutan, dengan IKK yaitu: (1) Pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah (kumulatif) meningkat 15%, (2) Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 10%, (3) Efisiensi penggunaan bahan baku industri meningkat sebesar 2%.

- f. Pemantauan Usaha Kehutanan dan Pembinaan Ganis Wasganis PHPL. Kegiatan ini merupakan fasilitas untuk UPT BP₂HP dalam operasionalisasi capaian kinerja Ditjen Bina Usaha Kehutanan, dalam memantau pelaksanaan usaha-usaha kehutanan di daerah. *Output* dari kegiatan ini adalah penyelenggaraan usaha kehutanan secara lestari di unit-unit usaha kehutanan. Indikator kerjanya untuk Tahun 2012 adalah (1) Dokumen peredaran tertib sesuai peraturan perundangan minimal 85% di Tahun 2012, (2) Kualitas kinerja Ganis dan Wasganis meningkat minimal menjadi 50% di Tahun 2012, (3) Pembangunan HTR seluas 80.000 Ha.
 - g. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Usaha Kehutanan. *Output* kegiatan ini adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi Ditjen Bina Usaha Kehutanan berjalan secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun di unit daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Kehutanan. IKK dari kegiatan ini adalah: (1) Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen BUK sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 24 satker, (2) Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen BUK dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut "wajar tanpa pengecualian" mulai laporan keuangan Tahun 2011 sebanyak 24 satker.
3. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
- a. Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung. Memiliki *output* meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan 50 unit TN dan 477 unit kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB dan HL), dan ekosistem esensial lainnya. IKK yang hendak dicapai adalah: (1) Terjaminnya konflik dan tekanan terhadap kawasan TN dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 1%; (2) Terjaminnya pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat sebesar 2%; (3) Terjaminnya penanganan perambahan kawasan hutan pada 2 provinsi; (4) Terjaminnya restorasi ekosistem kawasan konservasi, 1 lokasi; (5) Terjaminnya peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 10 TN prioritas; (6) Terjaminnya peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 2 provinsi; (7) Terjaminnya peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal

800.000,00 per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 6%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.

- b. Penyidikan dan Pengamanan Hutan. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan. IKK yang hendak dicapai adalah (1) Terjaminnya kasus baru tindak pidana kehutanan (*illegal logging*, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal 45%; (2) Terjaminnya tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 57,80%; (3) Terjaminnya kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikan sebanyak 12%; (4) Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan di 10 provinsi.
- c. Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas konservasi keanekaragaman hayati dan produk tumbuhan dan satwa liar. IKK yang hendak dicapai untuk mendekati output di atas adalah: (1) Terjaminnya populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 1,5% dari kondisi Tahun 2008 sesuai kesediaan habitat; (2) Terjaminnya penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 1%; (3) Kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi keanekaragaman hayati sebanyak 1 paket per tahun; (4) Terselenggaranya skema DNS Kehutanan, 2 aktifitas.
- d. Pengendalian Kebakaran Hutan. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya sistem pencegahan, pemadaman, penanggulangan dampak kebakaran hutan dan lahan. IKK yang hendak dicapai adalah (1) Terjaminnya hotspot di pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Sulawesi berkurang 48,80% setiap tahun dari rerata 2005-2009; (2) Terjaminnya kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 30% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009; (3) Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 6 DAOPS.
- e. Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam. Kondisi yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah: (1) Perusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 36% dibandingkan Tahun 2008; (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 5 unit; (3) Terjaminnya PNBPN dibidang

pengusahaan pariwisata alam meningkat 60% dibanding Tahun 2008; (4) Pelaksanaan demonstration activity REDD di 1 kawasan konservasi (hutan gambut); (5) Terjaminnya Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ kelompok Profesi (KSM/KP) yang dapat diberdayakan meningkat 6% dari Tahun 2009

- f. Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional. Kegiatan ini merupakan fasilitas untuk UPT Balai Taman Nasional dalam mencapai kinerja lingkup Ditjen PHKA, yang output nya adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan TN, kelestarian kawasan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. IKK untuk Tahun 2012 adalah: (1) Konflik dan tekanan terhadap kawasan Taman Nasional menurun sebanyak 1%; (2) Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 10 TN; (3) Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 45%; (4) Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 57, 80% per tahun; (5) Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikan sebanyak 12%; (6) Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 1.5% dari kondisi Tahun 2008 sesuai kesediaan habitat; (7) Hotspot di pulau Kalimantan, pulau Sumatera, pulau Sulawesi berkurang 48,80% setiap tahun dari rerata 2005-2009; (8) Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 30% dalam 5 tahun disbanding kondisi rerata 2005-2009; (9) Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 36% dibandingkan Tahun 2008; (10) PNPB dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 60% dibanding Tahun 2008; (11) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar Taman Nasional 51 TN; (12) Tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan di seluruh Indonesia 51 TN.
- g. Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumberdaya Alam. Kegiatan ini merupakan fasilitas pengelolaan kawasan konservasi di luar Taman Nasional, yang dilakukan oleh UPT Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) dalam mencapai kinerja lingkup Ditjen PHKA. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistem esensial, kelestarian kawasan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. IKK Tahun 2011 yang diharapkan adalah: (1) Konflik dan tekanan terhadap kawasan

CA, SM, TB, dan HL menurun sebanyak 1%; (2) Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 2%; (3) Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 45%; (4) Tunggakan perkara (*illegal logging*, perambahan, perdagangan TSL *illegal*, penambangan *illegal* dan kebakaran) terselesaikan minimal 57,80% (5) Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 12%; (6) Populasi spesies prioritas utama yang terancam punahh meningkat sebesar 1.5% dari kondisi Tahun 2008 sesuai kesediaan habitat; (7) *Hotspot* di pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Sulawesi berkurang 48.80% setiap tahun dari rerata 2005-2009; (8) Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 30% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009; (9) Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 36% dibanding Tahun 2008; (10) PNPB dibanding pengusahaan pariwisata alam meningkat 60%; (11) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar kawasan konservasi; (12) Tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan di seluruh Indonesia 116 dokumen.

- h. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Hutan dan konservasi Alam. *Output* dari kegiatan ini adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi Dtjen PHKA berjalan secara efektif dan efisien baik di pusat maupun di daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kemenhut. IKK dari kegiatan ini adalah (1) Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PHKA sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 81 satker.; (2) Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen PHKA dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut "wajar tanpa pengecualian" mulai laporan keuangan Tahun 2011 sebanyak 81 satker; (3) Terbangunnya persiapan sistem pengelolaan BLU di 1 unit UPT PHKA.

4. Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

- a. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS prioritas. Kegiatan ini memiliki *output* berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan. IKK yang hendak dicapai adalah (1) Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 100.000 Ha; (2)

- Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 399.000 Ha; (3) Terjaminnya hutan kota seluas 1.000 Ha.
- b. Pengembangan Perhutanan Sosial. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengelolaan hutan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. IKK yang hendak dicapai adalah (1) Terjaminnya hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 400.000 Ha; (2) Terjaminnya izin usaha pengelolaan HKm sebanyak 100 kelompok; (3) Terjaminnya kemitraan usaha HKm sebanyak 10 unit; (4) Terjaminnya dukungan ketahanan pangan di 6 provinsi; (5) Terjaminnya hutan rakyat kemitraan untuk bahan kayu industri pertukangan seluas 50.000 Ha; (6) Terjaminnya sentra HHBK Unggulan terbentuk dan beroperasi di 6 lokasi; (7) Terjaminnya hutan desa seluas 100.000 Ha.
- c. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan. *Output* dari kegiatan ini adalah ketersediaan materi genetik, sumber benih dan tersedianya benih berkualitas yang memadai. IKK yang hendak dicapai adalah (1) Terjaminnya areal sumber benih seluas 4.500 Ha terkelola secara baik; (2) Terjaminnya areal sumber benih seluas 1.200 Ha; (3) Terjaminnya pengembangan Seed for people 20 lokasi; (4) Terjaminnya sentra bibit 5 unit terbangun.
- d. Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS. Kegiatan ini memiliki output terselenggaranya pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS prioritas, dengan IKK yang akan dicapai adalah (1) Terjaminnya rencana pengelolaan DAS terpadu di 36 DAS prioritas; (2) Terjaminnya base line data pengelolaan DAS di 36 DAS.
- e. Perencanaan, Penyelenggaraan RHL, Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi DAS. Kegiatan ini digunakan oleh UPT Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) di seluruh Indonesia untuk memfasilitasi capaian kinerja lingkup Ditjen BPDASPS, dengan output berkurangnya lahan kritis dan peningkatan pendapatan masyarakat. IKK Tahun 2012 adalah: (1) Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, pantai, gambut, dan rawa pada DAS prioritas seluas 500.000 Ha; (2) Terbangunnya hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 400.000 Ha; (3) Sentra HHBK unggulan terbentuk dan beroperasi di 6 lokasi; (4) Terbangunnya hutan rakyat kemitraan untuk bahan kayu industri pertukangan seluas 50.000 Ha; (5) Rencana pengelolaan DAS terpadu pada 36 unit DAS; (6) Terbangunnya hutan desa seluas 100.000 Ha.
- f. Perencanaan, Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi Hutan Mangrove. Kegiatan ini untuk memfasilitasi capaian kinerja terkait dengan UPT Balai

- Pengelolaan Hutan Mangrove (BPHM). *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengelolaan hutan mangrove, dengan IKK Tahun 2012 adalah: (1) Rencana pengelolaan hutan mangrove, 1 kegiatan; (2) Terbentuk dan berfungsinya kelompok kerja mangrove daerah, 8 provinsi.
- g. Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan. Kegiatan ini memfasilitasi UPT Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) untuk mendorong kinerja Ditjen BPDASPS, dengan *output* tersedianya sumber benih untuk mendukung RHL. IKK Tahun 2012 adalah: (1) Areal sumber benih seluas 4.500 Ha terkelola secara baik; (2) Areal sumber benih seluas 1.200 Ha; (3) Pengembangan Seed for people 20 lokasi; (4) Terbangunnya sentra bibit 5 unit.
 - h. Pengembangan Persuteraan Alam. Kegiatan ini mendorong capaian kinerja Ditjen BPDASPS untuk UPT Balai Persuteraan Alam. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah produksi sutera alam, dengan IKK Tahun 2012 adalah: (1) Jumlah unit usaha persuteraan alam meningkat sebesar 4 unit; (2) Peningkatan produksi sutera alam segmen hulu sebesar 5%.
 - i. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial. *Output* dari kegiatan ini adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi Ditjen BPDASPS berjalan secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kemenhut. IKK dari kegiatan ini adalah (1) Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen BPDASPS sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 50 satker.; (2) Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen BPDASPS dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut "wajar tanpa pengecualian" mulai laporan keuangan Tahun 2011 sebanyak 50 satker.
5. Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan
- a. Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan. *Output* yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah ketersediaan dan termanfaatkan iptek dasar dan terapan bidang lansekap hutan, perubahan iklim, dan kebijakan kehutanan, dengan IKK yaitu: (1) Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul terselesaikan 60%; (2) Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang

perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul tersebut di atas terselesaikan 60%.

- b. Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi. *Output* yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah ketersediaan dan termanfaatkan iptek dasar dan terapan bidang konservasi dan rehabilitasi, dengan IKK yaitu: (1) Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul, terselesaikan 60%; (2) Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul tersebut di atas terselesaikan 60%.
- c. Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan. *Output* yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah ketersediaannya IPTEK dasar dan terapan bidang keteknikan hutan dan pengolahan hasil hutan, dengan IKK yaitu: (1) Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang keteknikan kehutanan dan pengelolaan hasil hutan sebanyak 5 judul, terselesaikan 60%; (2) Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang keteknikan hutan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul tersebut diatas terselesaikan 60%.
- d. Penelitian dan Pengembangan Produktivitas Hutan. *Output* yang akan dihasilkan dari kegiatan ini adalah ketersediaan dan pemanfaatan IPTEK dasar dan terapan bidang peningkatan produktifitas hutan, dengan IKK yaitu: (1) Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang produktivitas hutan sebanyak 6 judul, terselesaikan 60%; (2) Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang produktifitas hutan sebanyak 6 judul tersebut diatas terselesaikan 60%.
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. *Output* dari kegiatan ini adalah terselenggaranya tugas dan fungsi Badan Litbang secara efektif dan efisien baik pada unit kerja di pusat maupun di daerah, dan menjadi bagian dalam mendukung perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kemenhut. IKK dari kegiatan ini adalah (1) Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 20 satker.; (2) Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut "wajar

tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan Tahun 2011 sebanyak 20 satker; (3) Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebanyak 33 unit KHDTK.

6. Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

- a. Pengembangan Penyuluhan Kehutanan. *Output* dari kegiatan ini adalah terwujudnya sistem penyuluhan kehutanan yang aplikatif. IKK dari kegiatan ini adalah (1) Peningkatan efektifitas penyuluhan kehutanan melalui penyusunan program penyuluhan kehutanan nasional sebanyak 1 dokumen; (2) Sertifikat penyuluh kehutanan sejumlah 300 orang; (3) Kampanye Indonesia Menanam (KIM) di 33 provinsi.
- b. Peningkatan Pelayanan Penyuluhan Kehutanan. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran dan partisipasi pelaku utama dan pelaku usaha serta peran penyuluh dalam pembangunan kehutanan. IKK dari kegiatan ini pada Tahun 2012 adalah (1) Kelompok masyarakat produktif mandiri 100 kelompok; (2) Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan sejumlah 1.000 orang.
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan lainnya. *Output* dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM Kemenhut serta SDM kehutanan lainnya (Pemda dan Masyarakat). IKK yang hendak dicapai antara lain: (1) Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan administrasi kehutanan minimal sebanyak 3.000 orang; (2) Pendidikan menengah kejuruan kehutanan sebanyak 855 siswa; (3) Pendidikan pasca sarjana jenjang S2 dan S3 sebanyak 65 orang lulusan; (4) Sertifikasi ISO 9001:2008 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan sejumlah 2 unit.
- d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan. *Output* dari kegiatan ini adalah terselenggaranya tugas dan fungsi Badan PPSDMK secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kemenhut. IKK dari kegiatan ini adalah (1) Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 17 satker; (2) Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan dalam rangka mewujudkan opini laporan

keuangan Kemenhut “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan Tahun 2011 sebanyak 17 satker; (3) Terbentuknya 12 dokumen kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat; (4) Terbentuknya kelembagaan penyuluhan di 1 provinsi, 20 kabupaten/kota.

7. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan

- a. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat I. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya audit kinerja, keuangan dan administrasi pada satuan-satuan kerja Kemenhut di wilayah kerja Inspektorat I. IKK antara lain (1) Kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektorat I ditekan hingga 30% dari Tahun 2009; (2) Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat I berkurang hingga 30% dari Tahun 2009; (3) Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat I berkurang hingga 30% dari Tahun 2009.
- b. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat II. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya audit kinerja, keuangan dan administrasi pada satuan-satuan kerja Kemenhut di wilayah kerja Inspektorat II. IKK dari kegiatan ini antara lain (1) Kelemahan administrasi di wilayah kerja inspektorat II ditekan hingga 30% dari Tahun 2009; (2) Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat II berkurang hingga 30% dari Tahun 2009; (3) Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat II berkurang hingga 30% dari Tahun 2009.
- c. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat III. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya audit kinerja, keuangan dan administrasi pada satuan-satuan kerja Kemenhut di wilayah kerja Inspektorat III. IKK dari kegiatan ini antara lain: (1) Kelemahan administrasi di wilayah kerja inspektorat III ditekan hingga 30% dari Tahun 2009; (2) Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat III berkurang hingga 30% dari Tahun 2009; (3) Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat III berkurang hingga 30% dari Tahun 2009.
- d. Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat IV. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya audit kinerja, keuangan dan administrasi pada satuan-satuan kerja Kemenhut di wilayah kerja

- Inspektorat IV. IKK dari kegiatan ini antara lain: (1) Kelemahan administrasi di wilayah kerja inspektorat IV ditekan hingga 30% dari Tahun 2009; (2) Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat IV berkurang hingga 30% dari Tahun 2009; (3) Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat IV berkurang hingga 30% dari Tahun 2009.
- e. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Beridinkasi KKN. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya audit terhadap kasus yang diduga beridinkasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). IKK pada kegiatan ini adalah potensi kerugian Negara dapat diturunkan hingga 15% dari temuan Tahun 2006-2009.
 - f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan. Output dari kegiatan ini adalah tereselegaranya tata kelola administrasi Itjen Kemenhut secara efektif dan efisien, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola Kemenhut. Kegiatan ini memiliki IKK yaitu (1) Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Itjen Kemenhut sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 6 satker; (2) Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Itjen Kemenhut dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut "wajar tanpa pengecualian" mulai laporan keuangan Tahun 2011 sebanyak 6 satker.
8. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan.
- a. Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan. Kegiatan ini memiliki *output* terselenggaranya koordinasi perencanaan dan evaluasi Kementerian Kehutanan secara baik dan mantab. IKK dari kegiatan ini adalah (1) Penyerapan anggaran meningkat minimal menjadi 85% diakhir Tahun 2012; (2) Pencapaian sasaran strategis minimal 54% di akhir Tahun 2012; (3) Model implementasi kebijakan kehutanan di 3 kabupaten.
 - b. Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian. *Output* dari kegiatan ini adalah terselenggaranya tertib dan pelayanan administrasi kepegawaian Kemenhut. IKK yang hendak dicapai adalah (1) Pelayanan administrasi kepegawaian minimal 90% akurat dan tepat waktu; (2) Prasarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal terpenuhi 90%; (3) Data Kepegawaian dalam SIMPEG minimal 90% sesuai dengan data yang dimiliki individu PNS.

- c. Penyelenggaraan dan Pembinaan Tata Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan. Kegiatan ini diharapkan memperoleh *output* mantapnya tata hukum dan organisasi di lingkup Kementerian Kehutanan, dengan IKK antara lain: (1) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Kemenhut minimal 45% di akhir Tahun 2012; (2) Pencapaian penelaahan hukum peraturan perundang-undangan lingkup Kemenhut minimal sebesar 48% di akhir Tahun 2012; (3) Penanganan perkara, pemulihan hak-hak Negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 48% di akhir Tahun 2012; (4) Pencapaian pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan lingkup Kemenhut minimal sebesar 42% di akhir Tahun 2012.
- d. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kemenhut. Output dari kegiatan ini adalah tertibnya pelaksanaan administrasi keuangan Kemenhut. IKK yang hendak dicapai adalah (1) Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 69 unit perusahaan terselesaikan KUK-DAS, KUHR dan KUPA serta PSDH DR sebesar 45%; (2) Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan "wajar tanpa pengecualian" mulai laporan Tahun 2011, sebanyak 1 judul; (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2012 sebesar Rp. 2,75 Trilyun.
- e. Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian Kehutanan. Output dari kegiatan ini adalah tertibnya pelaksanaan tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan BMN Kemenhut. IKK yang hendak dicapai adalah (1) SIMAK BMN secara akuntabel dan tepat waktu 225 satuan kerja per tahun; (2) Sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia/pejabat pengadaan di Kementerian Kehutanan sebanyak 200 orang; (3) Sertifikasi tanah milik Kementerian Kehutanan di 5 lokasi (Manggala Wanabakti, Kanci, Cimanggis, Kramatjati, dan Rumpin); (4) Tersesainya status pencatatan BMN eks Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 5 provinsi.
- f. Pembinaan Standarisasi, Pengelolaan Lingkungan dan Penanganan Perubahan Iklim Kehutanan. Output dari kegiatan ini adalah berkembangnya standardisasi produk, proses dan kompetensi teknis di bidang kehutanan, peningkatan pengelolaan lingkungan dan penanganan perubahan iklim kehutanan. IKK dari kegiatan ini adalah (1) Standar produk dan jasa kehutanan, serta pedoman pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim 7 produk; (2) Sertifikasi pengelolaan

- hutan rakyat 3 unit; (3) Rekomendasi kebijakan penanganan perubahan iklim kehutanan sebanyak 1 paket.
- g. Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya peran dan posisi Indonesia di bidang kehutanan, dengan IKK yang akan dicapai adalah (1) Partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) di bidang kehutanan sebanyak 3 paket per tahun; (2) Komitmen kerjasama internasional di bidang kehutanan (bilateral, multilateral, regional, dan multipihak) sebanyak 1 paket; (3) Kerjasama baru bilateral sebanyak 1 negara 1 lembaga; (4) Laporan monitoring dan evaluasi kerjasama internasional (bilateral, multilateral, dan regional) sebanyak 3 paket per tahun.
 - h. Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan. Output dari kegiatan ini adalah memperkuat pemahaman dan komitmen masyarakat terhadap pembangunan kehutanan. IKK dari kegiatan ini adalah (1) Meningkatnya citra positif Kemenhut sebesar 10% per tahun; (2) Meningkatnya berita kegiatan pimpinan Kemenhut sebesar 10% per tahun; (3) Meningkatnya publikasi kebijakan program pembangunan kehutanan sebesar 10% per tahun; (4) Hubungan dengan lembaga tinggi negara, pemerintah dan lembaga non pemerintah meningkat sebesar 10% per tahun.
 - i. Pengelolaan Keuangan, Penyaluran, dan Pengembalian Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Kehutanan. Kegiatan ini memiliki output fasilitasi dan ketersediaan pembiayaan pembangunan kehutanan, dengan IKK adalah (1) Kredit pembangunan hutan tanaman (hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat seluas 80.000 Ha; (2) Pemahaman terhadap skim pinjaman pembangunan hutan tanaman di 12 kabupaten Tahun 2012; (3) Peningkatan penguatan kelembagaan debitur di 3 kabupaten Tahun 2012.
 - j. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I. Output dari kegiatan ini adalah memperkuat sinkronisasi pembangunan kehutanan pada regional I, dengan IKK yang akan dicapai adalah (1) Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional I berjalan minimal 54%; (2) Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional I, 1 dokumen.
 - k. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II. Output dari kegiatan ini adalah memperkuat sinkronisasi pembangunan kehutanan pada regional II, dengan IKK yang akan dicapai adalah (1) Pelaksanaan pembangunan kehutanan

di regional II berjalan minimal 54%; (2) Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional II, 1 dokumen.

- l. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III. Output dari kegiatan ini adalah memperkuat sinkronisasi pembangunan kehutanan pada regional III, dengan IKK yang akan dicapai adalah (1) Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional III berjalan minimal 54%; (2) Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional III, 1 dokumen.
- m. Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV. Output dari kegiatan ini adalah memperkuat sinkronisasi pembangunan kehutanan pada regional IV, dengan IKK yang akan dicapai adalah (1) Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional IV berjalan minimal 54%; (2) Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional IV, 1 dokumen.

C. Distribusi Sasaran Pembangunan Tiap Provinsi

Indikatif distribusi sasaran pembangunan Tahun 2012 untuk regional I Sumatera disajikan sebagai berikut :

Sasaran	Aceh	Sumut	Sumbang	Riau	Kepri	Jambi	Bengkulu	Sumsel	Babel	Lampung
Tata Batas (km)	500	1.000	500	200	500	250	400	400	250	400
KPH beroperasi (unit)	2	2	2	3	1	3	1	3	1	5
Penambahan areal HTI/HTR (ha)	-	4.000	1.250	45.000	-	52.000	-	79.000	-	31.500
Produksi kayu/HHBK/jasling meningkat (%)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hotspot berkurang dari rerata 2005-2009 (%)	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8
Konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi berkurang (%)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
RHL (ha)	9.830	26.932	3.082	58.074	3.359	16.541	10.412	30.701	8.556	13.576

HKm (ha)	15.000	30.000	20.000	15.000	300	15.000	20.000	20.000	2.000	15.000
HD (ha)	500	2.000	5.000	2.000	-	20.000	2.000	15.000	150	1.000
KBR (unit)	521	1.149	190	687	60	514	480	788	202	537
Persemaian permanen (unit)	3	5	-	7	-	4	4	4	2	5
Masyarakat produktif mandiri (kelompok)	3	4	3	3	2	3	3	3	3	4

Untuk indikatif regional II disajikan sebagai berikut :

Sasaran	Banten	DKI	Jabar	Jateng	DIY	Jatim	Bali	NTT	NTB
Tata Batas (km)	178	-	250	40	30	200	-	500	
KPH beroperasi (unit)	-	-	-	-	1	-	3	2	3
Penambahan areal HTI/HTR (ha)	-	-	-	-	-	-	-	25.000	11.450
Produksi kayu/HHBK/jasling meningkat (%)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hotspot berkurang dari rerata 2005-2009 (%)	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8
Konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi berkurang (%)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
RHL (ha)	-	-	12.428	6.439	3.215	6.919	1.225	23.987	3.306
HKm (ha)	-	-	-	-	-	-	-	25.000	20.000
HD (ha)	-	-	-	-	-	-	1.500	-	-
HR (kemitraan)	-	-	10.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-
KBR (unit)	-	-	812	947	482	788	156	876	354

Persemaian permanen (unit)	-	-	5	5	-	4	2	5	2
Masyarakat produktif mandiri (kelompok)	3	2	4	4	3	4	3	3	3

Untuk regional III Kalimantan, indikatif distribusi sasaran Tahun 2012 disajikan sebagai berikut :

Sasaran	Kalbar	Kalteng	Kalsel	Kaltim
Tata batas (km)	1.000	1.100	400	2.000
KPH Beroperasi (unit)	3	2	3	4
Penambahan hutan tanaman (HTI/HTR) (ha)	100.000	2.200	17.500	50.000
IUPHHK-HA/RE	-	370.000	-	-
Hotspot berkurang dari rerata 2005-2009 (%)	48,8	48,8	48,8	48,8
Populasi spesies terancam punah meningkat dari tahun 2008 (%)	1,5	1,5	1,5	1,5
Hotspot berkurang dari rerata 2005-2009 (%)	48,8	48,8	48,8	48,8
RHL (ha)	22.347	43.211	21.273	72.983
HKm (ha)	20.000	25.000	25.000	15.000
HD (ha)	15.000	5.000	5.000	5.000
KBR (unit)	653	213	617	434
Persemaian Permanen (unit)	4	4	4	4
Kelompok Masyarakat Produktif Mandiri	3	3	3	3

Sedangkan untuk Regional IV Sulawesi-Maluku-Papua, adalah sebagai berikut :

Sasaran	Sulut	Sulteng	Sulsel	Sultra	Sulbar	Gorontalo	Maluku	Malut	Papua	Parat
Tata Batas (km)	200	700	100	300	100	700	1.000	300	1.500	1.000
KPH beroperasi (unit)	1	2	1	2	5	2	1	1	2	1
Penambahan areal HTI/HTR (ha)	2.000	-	6.000	11.000	-	-	10.000	2.000	50.000	-
Produksi kayu/HHBK/jasling meningkat (%)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Hotspot</i> berkurang dari rerata 2005-2009 (%)	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8
Konflik dan tekanan terhadap kawasan konservasi berkurang (%)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
RHL (ha)	1.202	3.411	11.433	20.238	5.413	6.641	6.065	4.580	37.424	5.197
HKm (ha)	15.000	20.000	30.000	20.000	10.000	15.000	2.700	5.000	-	-
HD (ha)	2.000	10.000	1.500	5.000	850	500	-	1.000	-	-
KBR (unit)	371	298	793	512	279	184	270	258	394	181
Persemaian permanen (unit)	2	3	5	4	3	3	3	1	2	2
Masyarakat produktif mandiri (kelompok)	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2

D. Rencana PNBP Tahun 2012

Target PNBP Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 2.864.805,908.789,- dan kebijakan yang ditempuh untuk memenuhi target ini adalah :

1. Optimalisasi Penerimaan PNBP, yaitu : (a) Melakukan pengembangan sistem Penata Usahaan Hasil Hutan (PUHH) berbasis teknologi informasi (TI) yang dapat diakses di Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Propinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, serta para pemegang IUPHHK-HA/HT di lingkungan Kementerian Kehutanan; dan (b) Intensifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan.
2. Jenis dan Tarif PNBP Sektor Kehutanan, antara lain : (a) Dana Reboisasi (DR), adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu; (b) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara; (c) IIUPHK-HT, adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang ijin usaha perusahaan hutan berupa Iuran Ijin Usaha Pemungutan Hasil Kayu Hutan Tanaman, yang dilakukan sekali pada saat ijin tersebut diberikan; (d) IIPHK-HA, adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang ijin usaha perusahaan hutan berupa Iuran Ijin Usaha Pemungutan Hasil Kayu Hutan Alam, yang dilakukan sekali pada saat ijin tersebut diberikan; (e) Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan; (f) Iuran menangkap/mengambil/mengangkut satwa liar, tumbuhan alam hidup atau mati; (g) Pungutan masuk obyek wisata alam; (h) Pungutan izin perusahaan pariwisata alam (PIPPA); (i) Iuran Hasil Usaha Perusahaan Pariwisata Alam (IHUPA); (j) BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

Tarif yang berlaku pada PNBP Sektor Kehutanan, adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1999 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada

Kementerian Kehutanan; Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 Tentang Peraturan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1988 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Perkebunan; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan pembangunan di Luar Kegiatan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan; serta Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 08/M.DAG/PER/2/1977 Tentang Penetapan Harga Patokan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu dan Bukan Kayu.

Berikut dibawah ini adalah rencana PNBPN Tahun 2012, sebagai berikut :

No	Jenis PNBPN	Usulan 2011	Usulan 2012
1.	Dana Reboisasi	1.203.676.476.605	1.409.725.550.000
2.	PSDH	1.359.053.335.089	1.104.885.756.000
3.	IIUPHK-HT	5.409.150.000	1.300.000.000
4.	IIUPHK-HA	89.485.282.000	11.250.000.000
5.	Penggunaan Kawasan Hutan	175.018.696.500	227.293.588.500
6.	Iuran menangkap/mengambil/mengangkut satwa liar, tumbuhan alam hidup atau mati	10.036.693.684	6.493.604.639
7.	Pungutan masuk obyek wisata alam	17.155.263.500	21.984.247.150
8.	Pungutan izin pengusahaan pariwisata alam (PIPPA)	1.056.374.000	3.020.151.360
9.	Iuran hasil usaha pengusahaan pariwisata alam (IHUPA)	638.000.000	95.400.000
10.	BLU pusat pembiayaan pembangunan hutan	3.007.377.389	3.257.611.140
11.	Penerimaan pinjaman dan kredit HTI	75.500.000.000	75.500.000.000
Jumlah		2.940.036.648.767	2.864.805,908.789

Target penerimaan PNBPN Tahun 2012 lebih kecil daripada target PNBPN Tahun 2011, hal ini disebabkan adanya penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, penerimaan PSDH serta IIUPHHK – HT dan IUPHHK - HA yang menurun dikarenakan hasil/produksi hutan tanaman menurun akibat adanya moratorium ijin baru akan tetapi penerimaan DR naik dikarenakan adanya kenaikan target terhadap kelompok jenis kayu komersial.

Berdasarkan pagu indikatif anggaran Kementerian Kehutanan tahun anggaran 2012, kegiatan yang dibiayai dari PNBP per program adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM/ESELON I	PNBP
01.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan (SETJEN)	26.632.210.419
02.	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan(LITBANG)	26.632.210.419
03.	Peningkatan Usaha Kehutanan	26.632.210.419
04.	Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (BPDASPS)	532.644.208.370
05.	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan (PHKA)	221.935.086.821
06.	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemanapan Kawasan Hutan (PLANOLOGI)	31.070.912.155
07.	Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan (BP2SDM)	22.193.508.682
TOTAL		887.740.347.285

E. Rencana Anggaran Tahun 2012

Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor : 0091/M.PPN/03/2011 dan SE-189.1/MK.02/2011, Kementerian Kehutanan mendapatkan alokasi Pagu Indikatif sebesar Rp. 6.001.059.700.000,- dengan sumber dana terdiri dari :

1. Rupiah Murni : Rp. 5.091.971.700.000,-
2. PHLN : Rp. 21.347.700.000,-
3. PNBP : Rp. 887.740.300.000,-

Berdasarkan Kesepakatan Tiga Pihak (Trilateral) antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan pada tanggal 6 April 2011 disepakati alokasi anggaran per program Kementerian Kehutanan Tahun 2012 adalah sebagai berikut (Alokasi anggaran disajikan dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2).

No	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenhut	425.529.000.000
2.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenhut	55.240.000.000
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Kemenhut	270.490.000.000
4.	Program Peningkatan Usaha Kehutanan	340.777.000.000
5.	Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat	2.600.000.000.000
6.	Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	1.386.280.000.000
7.	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	681.803.700.000
8.	Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan	240.940.000.000
	Total	6.001.059.700.000

Dari pagu sebesar Rp.6,001 trilyun dimaksud, sebesar Rp.165,689 milyar diantaranya digunakan untuk membiayai kegiatan yang didekonsentrasikan kepada dinas yang membidangi kehutanan di provinsi dan/atau Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi. Beberapa kegiatan yang difasilitasi melalui dana dekonsentrasi adalah peningkatan usaha hutan tanaman, peningkatan usaha hutan alam, peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan, peningkatan pelayanan penyuluhan, penyidikan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan, pengukuhan kawasan hutan, dan lain-lain. Data indikatif alokasi dana dekonsentrasi disajikan pada Lampiran 3.

IV. PENUTUP

Renja Tahun 2012 ini merupakan komitmen Kemenhut dalam mendorong capaian pembangunan kehutanan, sesuai peran yang diambilnya dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari pencapaian pembangunan nasional yang telah digariskan di dalam Renstra Kemenhut Tahun 2010-2014.

Ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan Tahun 2012 sejauh mungkin telah dibangun dan diletakkan pada konteks pelaksanaan tugas fungsi dari unit kerja di lingkungan Kemenhut, dalam bentuk indikator kinerja. Demikian pula, seluruh target pembangunan telah didistribusikan ke dalam wilayah provinsi, yang selanjutnya arahan dari target tiap provinsi juga merupakan bahan evaluasi terhadap unit-unit kerja yang memiliki tanggung jawab dalam pencapaiannya, mulai dari pejabat Eselon I sebagai penanggung jawab program, pejabat Eselon II sebagai penanggung jawab kegiatan, sampai kepala UPT sebagai pelaksana kebijakan dan penanggung jawab kegiatan UPT.

Pemantauan dan evaluasi secara reguler akan dilaksanakan dan hasilnya disarikan sebagai perbaikan dan pengambilan kebijakan sehingga setiap target dapat dicapai dan menjadi penilaian bagi tahun mendatang. Secara berkala, hasil pemantauan capaian pembangunan juga akan disampaikan kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerja pembangunan.

Akhirnya, seluruh elemen Kemenhut diharapkan secara nyata memberikan peran dan sumbangannya, serta bersinergi menyelesaikan permasalahan pembangunan kehutanan sehingga seluruh capain pembangunan kehutanan Tahun 2012 dapat diwujudkan.

Lampiran 1 : Indikator Kinerja Kegiatan Kementerian Kehutanan Tahun 2012

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikatorif (Milyar Rp)
1.	Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas.		2.600,00
a.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 100.000 ha. ▪ Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 399.000 ha. ▪ Terjaminnya hutan kota seluas 1000 ha. 	22,40
b.	Pengembangan Perhutanan Sosial	meningkatkan pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjaminnya hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 400.000 ha ▪ Terjaminnya ijin usaha pengelolaan HKm sebanyak 100 kelompok ▪ Terjaminnya kemitraan usaha HKm sebanyak 10 unit ▪ Terjaminnya dukungan ketahanan pangan di 6 provinsi ▪ Terjaminnya hutan rakyat Kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 50.000 Ha ▪ Terjaminnya sentra HHBK Unggulan 	18,23

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikator (Milyar Rp)
c.	Pengembangan perbenihan tanaman hutan	ketersediaan materi genetik, sumber benih, dan benih berkualitas yang memadai	terbentuk dan beroperasi di 6 lokasi ▪ Terjaminnya hutan desa seluas 100.000 ha ▪ Terjaminnya areal sumber benih seluas 4.500 ha dikelola secara baik ▪ Terjaminnya areal sumber benih seluas 1.200 ha ▪ Terjaminnya pengembangan Seed for People 20 lokasi ▪ Terjaminnya sentra bibit 5 Unit terbangun	20,92
d.	Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS	Terselenggaranya pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS prioritas	▪ Terjaminnya rencana pengelolaan DAS terpadu di 36 DAS prioritas ▪ Terjaminnya base line data pengelolaan DAS di 36 DAS	53,46
e.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial	penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial berjalan secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun di unit daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Kehutanan	▪ Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen BPDASPS sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 50 satker ▪ Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen BPDASPS dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut "wajar tanpa pengecualian" mulai laporan keuangan Tahun 2011	84,60

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikator (Milyar Rp)
f.	Perencanaan, penyelenggaraan RHL, pengembangan kelembagaan dan evaluasi DAS	Berkurangnya lahan kritis dan peningkatan pendapatan masyarakat	sebanyak 50 Satker ▪ Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, pantai, gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas 500.000 ha. ▪ Terbangunnya hutan kemasyarakatan (HKM) seluas 400.000 ha. ▪ Sentra HHBK Unggulan terbentuk dan beroperasi di 6 lokasi ▪ Terbangunnya hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku industri pertukangan seluas 50.000 ha. ▪ Rencana pengelolaan DAS terpadu pada 36 unit DAS ▪ Terbangunnya hutan desa seluas 100.000 ha.	2.288,85
g.	Perencanaan, pengembangan kelembagaan dan evaluasi hutan mangrove	Meningkatnya pengelolaan hutan mangrove	▪ Rencana pengelolaan hutan mangrove, 1 kegiatan ▪ Terbentuk dan berfungsinya kelompok kerja mangrove daerah, 8 provinsi	18,70
h.	Penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan	Tersedianya sumber benih untuk mendukung RHL	▪ Areal sumber benih seluas 4.500 ha dikelola secara baik. ▪ Areal sumber benih seluas 1.200 ha. ▪ Pengembangan Seed for People 20 lokasi ▪ Terbangunnya sentra bibit 5 Unit.	78,92

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikator (Milyar Rp)
i.	Pengembangan Persuteraan Alam	Meningkatnya jumlah produksi sutera alam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah unit usaha persuteraan alam meningkat sebesar 4 unit ▪ Peningkatan produksi sutera alam segmen hulu sebesar 5% 	13,92
2.	Peningkatan Usaha Kehutanan	Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan industry primer hasil hutan, serta peningkatan produksidan diversifikasi hasil hutan.		340,78
a.	Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	Peningkatan produksi hutan tanaman dari HTI/HTR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penambahan luas areal pencadangan ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 500.000 ha ▪ Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 500.000 ha. ▪ Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 10 unit manajemen hutan tanaman 	29,02
b.	Peningkatan Usaha Hutan Alam	Peningkatan produksi dan diversifikasi usaha hutan alam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produksi hasil hutan kayu meningkat sebesar 1 % ▪ Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 10 % ▪ 30% produksi penebangan bersertifikat Legalitas Kayu 	22,21
c.	Perencanaan Pemanfaatan dan	areal hutan produksi tertata baik dalam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbentuknya KPHP pada 60% seluruh 	20,12

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikator (Milyar Rp)
	Peningkatan Usaha Kawasan Hutan	kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) maupun unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi	kawasan hutan produksi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya 60% areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 provinsi. ▪ Produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan meningkat sebesar 1% • Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan (LOA) seluas 450.000 ha 	
d.	Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan	Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan tertib sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> • PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 2% • Implementasi SIM PUHH secara online di 60% unit management IUPHHK dan IPHHK 	27,61
e.	Peningkatan usaha industri primer kehutanan	Peningkatan ekspor industri hasil hutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah (kumulatif) meningkat 15% ▪ Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 10% ▪ Efisiensi penggunaan bahan baku industri meningkat sebesar 6% (rata-rata 2% per tahun) 	23,78
f.	Dukungan Manajemen dan	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Ditjen Bina	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tata kelola pemerintahan yang baik di 	47,85

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikator (Milyar Rp)
	Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Usaha Kehutanan	Usaha Kehutanan berjalan secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun di unit daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Kehutanan	lingkungan Ditjen BUK sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 24 satker <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen BUK dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut "wajar tanpa pengecualian" mulai laporan keuangan tahun 2011.sebanyak 24 Satker 	170,19
g.	Pemantauan Usaha Kehutanan dan Pembinaan Ganis Wasganis PHPL	Penyelenggaraan usaha kehutanan secara lestari di unit-unit usaha kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen peredaran tertib sesuai peraturan perundangan minimal 85%. ▪ Kualitas kinerja Ganis dan Wasganis meningkat minimal 50%. ▪ Pembangunan HTR seluas 80.000 Ha. 	1.386,28
3.	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Biodiversiti dan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pegaulan global		
a.	Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial dan Pembinaan Hutan lindung	Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) dan ekosistem esensial.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjaminnya konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 1%. ▪ Terjaminnya pengelolaan ekosistem 	50,48

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikator (Milyar Rp)
			<p>esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 2%.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjaminnya penanganan perambahan kawasan hutan pada 2 provinsi prioritas. ▪ Terjaminnya restorasi ekosistem kawasan konservasi, 1 lokasi ▪ Terjaminnya peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 10 TN prioritas ▪ Terjaminnya peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 2 provinsi ▪ Terjaminnya peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu sebesar 6% sehingga pada Tahun 2014 menjadi minimal Rp 800.000,00 per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. 	
b.	Penyidikan dan Pengamanan Hutan	Meningkatnya pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjaminnya kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL, illegal, penambangan illegal dan kebakaran) 	63,99

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikator (Milyar Rp)
c.	Pengembangan konservasi spesies dan genetik	Meningkatnya keanekaragaman tumbuhan dan satwa liar kualitas hayati dan konservasi produk dan	<p>penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 45%</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjaminnya tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 57,8% (25% per tahun) ▪ Terjaminnya kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 12% ▪ Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan di 10 provinsi 	17,82
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjaminnya populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 1,5% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat ▪ Terjaminnya penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 1% ▪ Kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi keanekaragaman hayati sebanyak 1 paket per tahun ▪ Terselenggaranya skema DNS Kehutanan, 2 aktifitas 	

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikator (Milyar Rp)
d.	Pengendalian kebakaran hutan	Meningkatkan sistem pencegahan pemadaman, penanggulangan, dampak kebakaran hutan dan lahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjaminnya hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 48,8% dari rerata 2005-2009 ▪ Terjaminnya kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 30% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009 ▪ Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 6 DAOPS 	57,02
e.	Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan	Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjaminnya pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 36% dibandingkan tahun 2008 ▪ Ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 5 unit. ▪ Terjaminnya PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 60% dibandingkan Tahun 2008. ▪ Pelaksanaan <i>demonstration activity</i> REDD di 1 kawasan konservasi (hutan gambut) ▪ Terjaminnya Kader konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), 	17,31

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikator (Milyar Rp)
f.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Ditjen PHKA berjalan secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun di unit daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Kehutanan	<p>Kelompok Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang dapat diberdayakan meningkat 6% dari Tahun 2009</p> <p>Swadaya</p> <p>▪ Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PHKA sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 81 satker</p> <p>▪ Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen PHKA dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut "wajar tanpa pengecualian" mulai laporan keuangan Tahun 2011 sebanyak 81 Satker</p> <p>▪ Terbangunnya persiapan sistem pengelolaan BLU di 1 UPT PHKA</p>	61,25
g.	Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan TN, kelestarian kawasan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan	<p>▪ Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional menurun sebanyak 1%</p> <p>▪ Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 10 TN</p> <p>▪ Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan,</p>	563,11

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikatif (Milyar Rp)
			<p>perdagangan TSL, illegal, penambangan ilegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 45%</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 57,8% per tahun ▪ Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 12% ▪ Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 1,5% dari kondisi Tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat ▪ <i>Hotspot</i> di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 48,8% dari rerata 2005-2009 ▪ Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 30% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009 ▪ Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 36% dibandingkan Tahun 2008 	

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikator (Milyar Rp)
h.	Pembangunan Pengelolaan Konservasi Sumberdaya Alam	Meningkatnya kapasitas pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistem esensial, kelestarian kawasan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PNBP dibidang perusahaan pariwisata alam meningkat 60% dibandingkan Tahun 2008. ▪ Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar 51 taman nasional ▪ Tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan di 51 taman nasional 	555,30
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konflik dan tekanan terhadap kawasan CA, SM, TB dan HL menurun sebanyak 1% ▪ Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 2%. ▪ Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL, illegal penambangan ilegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 45% ▪ Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 57,8% (25% per tahun) 	

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikatif (Milyar Rp)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 12% ▪ Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 1,5% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat ▪ <i>Hotspot</i> di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 48,8% dari rerata 2005-2009 ▪ Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 30% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009 ▪ Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 36% dibandingkan Tahun 2008. ▪ PNPB dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 60% dibandingkan Tahun 2008. ▪ Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar kawasan konservasi, 33 provinsi ▪ Tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan seluruh Indonesia, 116 	

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikator (Milyar Rp)
4.	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal	dokumen	681,80
a.	Pengukuhan Kawasan Hutan	Terwujudnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terjaminnya tata batas kawasan hutan sepanjang 16.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan ▪ Penunjukkan kawasan hutan provinsi selesai 100% ▪ Penetapan kawasan hutan yang telah di tata batas temu gelang selesai 75% per tahun ▪ Rekomendasi perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial selesai 75% per tahun ▪ SK pelepasan kawasan hutan secara parsial selesai 75% per tahun 	76,54
b.	Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Terwujudnya kepastian wilayah kelola KPH dan penyediaan areal pemanfaatan hutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah KPHL dan KPHP di 28 provinsi ▪ Beroperasinya 10% dari KPH yang ditetapkan ▪ Keputusan Menteri Kehutanan tentang 	21,29

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikator (Milyar Rp)
c.	Penyusunan rencana makro kawasan hutan	Terselenggaranya perencanaan, harmonisasi tata ruang dan sistem jaringan komunikasi data yang tepat dalam mendukung pemantapan kawasan hutan	<p>penetapan wilayah KPHK di seluruh Indonesia, terselesaikan 60%</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan perundangan tentang penyelenggaraan KPH sebanyak 1 judul ▪ Peta areal kerja dan peta pencadangan ijin pemanfaatan hutan selesai 50%. 	16,86
d.	Inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan	Tersedianya data dan informasi sumberdaya hutan seluruh Indonesia yang akurat dan terkini	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana makro penyelenggaraan kehutanan sebanyak 1 judul ▪ Peretujuan substansi teknis kehutanan terhadap usulan revisi tata ruang di 26 provinsi, terselesaikan 80% ▪ Sistem jaringan komunikasi data kehutanan LAN pusat dan WAN 17 provinsi sebanyak 1 sistem per tahun 	28,93

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikatif (Milyar Rp)
e.	Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan	Terwujudnya penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi, peruntukan dan peraturan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 1 kali update ▪ Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan terlayani 100% secara tepat waktu ▪ Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80% per tahun ▪ Data dan informasi penggunaan kawasan hutan di 6 provinsi ▪ Peraturan perundangan penggunaan kawasan hutan, 1 judul 	14,72
f.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan berjalan secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun di unit daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 23 satker ▪ Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut "wajar tanpa pengecualian" mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 23 Satker 	72,00
g.	Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan	Terwujudnya kepastian kawasan hutan dalam mendukung pemantapan kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Tata batas kawasan hutan sepanjang 16.000 km 	451,46

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikator (Milyar Rp)
			<ul style="list-style-type: none"> • Neraca Sumberdaya Hutan di 17 BPKH • Tersedianya Saspras dan tata hutan KPH 60 unit • Enumerasi dan re-Enumerasi TSP/PSP 599 plot 	
5.	Penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan	Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha serta kualitas aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan Lainnya.		240,94
a.	Pengembangan penyuluhan kehutanan	Meningkatnya sistem penyuluhan kehutanan yang aplikatif	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektifitas penyuluhan kehutanan melalui penyusunan program penyuluhan kehutanan nasional sebanyak 1 dokumen • Sertifikasi penyuluh kehutanan sejumlah 300 orang • Kampanye Indonesia Menanam (KIM) di 33 provinsi 	18,47
b.	Peningkatan pelayanan penyuluhan kehutanan	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi pelaku utama dan pelaku usaha serta peran penyuluh dalam pembangunan kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbentuknya 100 kelompok masyarakat produktif mandiri ▪ Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan sejumlah 1.000 orang. 	44,29
c.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Lainnya	Meningkatnya kualitas dan kapasitas aparatur Kemenhut serta SDM kehutanan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan administrasi kehutanan minimal sebanyak 3.000 orang peserta. 	150,38

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikator (Milyar Rp)
d.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM berjalan secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun di unit daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan menengah kejuruan kehutanan sebanyak 855 siswa. • Pendidikan pasca sarjana jenjang S2 dan S3 sebanyak 65 siswa • Sertifikasi ISO 9001 : 2008 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan sejumlah 2 unit. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 17 satker ▪ Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut "wajar tanpa pengecualian" mulai laporan keuangan Tahun 2011 sebanyak 17 Satker ▪ Terbentuknya 12 dokumen kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat ▪ Terbentuknya kelembagaan penyuluhan di 1 provinsi dan 20 kabupaten/kota. 	27,80

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikatif (Milyar Rp)
6.	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan	<p>Minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim</p> <p>Ketersediaan dan memanfaatkan iptek dasar dan terapan bidang lansekap hutan, perubahan iklim, dan kebijakan kehutanan</p>		270,49
a.	Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan		<p>Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul, yaitu : (1) strategi kebijakan bagi pengambil keputusan (<i>decision support system</i>, DSS) dalam penataan ruang dan penatagunaan hutan berbasis DAS; (2) strategi kebijakan (DSS) pengembangan hutan kota; (3) kebijakan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan; (4) teknik perhitungan emisi dan serapan gas rumah kaca (GRK) kehutanan; (5) strategi kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim; (6) strategi penguatan tata kelola kehutanan dan kinerja Kemenhut; (7) strategi penguatan tata kelola industri dan</p>	12,49

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikator (Milyar Rp)
b.	Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi	Ketersediaan dan pemanfaatannya Iptek dasar dan terapan bidang konservasi dan rehabilitasi	<p>perdagangan hasil hutan, terselesaikan 60%</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 60% iptek dasar dan terapan dimanfaatkan oleh pengguna di bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul tersebut di atas. 	112,81
			<ul style="list-style-type: none"> • Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul, yaitu : (1) teknik rehabilitasi hutan bekas tebangan; (2) teknik penanaman dan rehabilitasi mangrove; (3) teknik pengelolaan hutan rawa gambut ramah lingkungan; (4) teknik konservasi flora, fauna dan mikroorganisme; (5) teknik pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara lestari; (6) sistem pengelolaan DAS lintas sektoral dan wilayah administrasi; (7) teknik rehabilitasi dan restorasi lahan bekas tambang, terselesaikan 60% • 60% iptek dasar dan terapan dimanfaatkan oleh pengguna di bidang konservasi dan rehabilitasi 	

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikator (Milyar Rp)
c.	Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan	ketersediaan dan pemanfaatannya IPTEK dasar dan terapan bidang keteknikan hutan dan pengolahan hasil hutan	<p>sebanyak 7 judul tersebut di atas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul, yaitu : (1) informasi tentang sifat dasar dan kegunaan kayu sesuai tujuan pemakaiannya; (2) teknik pemanenan hutan ramah lingkungan; (3) teknik pemanfaatan dan peningkatan kualitas kayu serta standarisasi produk kayu; (4) teknik pengolahan, pemanfaatan dan diversifikasi produk HHBK; (5) terobosan perekayasaan alat dan teknik substitusi bahan pembantu industri perkayuan, terselesaikan 60% <ul style="list-style-type: none"> ▪ 60% iptek dasar dan terapan dimanfaatkan oleh pengguna di bidang keteknikan hutan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul tersebut di atas. 	25,61
d.	Penelitian dan Pengembangan Produktivitas Hutan	Ketersediaan dan pemanfaatan IPTEK dasar dan terapan bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu	<ul style="list-style-type: none"> • Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang produktifitas hutan sebanyak 6 judul, yaitu : (1) teknik peningkatan produktifitas hutan 	93,32

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikator (Milyar Rp)
e.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Litbang berjalan secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun di unit daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Kehutanan	<p>tanaman penghasil kayu pertukangan; (2) teknik peningkatan produktifitas hutan tanaman penghasil pulp; (3) teknik peningkatan produktifitas jenis-jenis tanaman kayu energi ; (4) teknik penyediaan benih unggul; (5) teknik peningkatan produktifitas dan nilai ekonomi HHBK FEM (food, energy, medicine); (6) teknik peningkatan produktifitas dan kualitas produk HHBK non FEM (gaharu, cendana, gemor, sutera, lebah madu, rusa), terselesaikan 60%</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60% iptek dasar dan terapan dimanfaatkan oleh pengguna di bidang produktifitas hutan 6 judul tersebut di atas. 	26,26
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Litbang Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 20 satker ▪ Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Litbang Kemenhut dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan 	

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikatorif (Milyar Rp)
7.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan	Terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Kehutanan, serta mendorong perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Kehutanan	Kemenhut "wajar tanpa pengecualian" mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 20 Satker ▪ Pengelolaan 33 unit Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)	55,24
a.	Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat I	Terlaksananya audit kinerja, keuangan, dan administrasi pada satuan-satuan kerja Kementerian Kehutanan di wilayah kerja Inspektorat I	<ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektorat I ditekan hingga 30% dari Tahun 2009 • Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat I berkurang hingga 30% dari Tahun 2009 • Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat I berkurang hingga 30% dari Tahun 2009 	4,82
b.	Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat II	Terlaksananya audit kinerja, keuangan, dan administrasi pada satuan kerja Kementerian Kehutanan di wilayah kerja Inspektorat II	<ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektorat II ditekan hingga 30% dari Tahun 2009 • Pelanggaran terhadap peraturan 	4,99

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikator (Milyar Rp)
c.	Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat III	Terlaksananya audit kinerja, keuangan, dan administrasi pada satuan kerja Kementerian Kehutanan di wilayah kerja Inspektorat III	<p>perundangan di wilayah kerja Inspektorat II berkurang hingga 30% dari Tahun 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat II berkurang hingga 30% dari Tahun 2009 • Kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektorat III ditekan hingga 30% dari Tahun 2009 • Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat III berkurang hingga 30% dari Tahun 2009 • Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat III berkurang hingga 30% dari Tahun 2009 	5,36
d.	Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat IV	Terlaksananya audit kinerja, keuangan, dan administrasi pada satuan kerja Kementerian Kehutanan di wilayah kerja Inspektorat IV	<ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektorat IV ditekan hingga 30% dari Tahun 2009 • Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat IV berkurang hingga 30% dari Tahun 2009 • Hambatan kelancaran pelaksanaan 	5,25

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikator (Milyar Rp)
e.	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	Terlaksananya audit terhadap kasus yang diduga berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	tugas di wilayah kerja Inspektorat IV berkurang hingga 30% dari tahun 2009	3,84
f.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan	Penyelenggaraan tugas dan fungsi Itjen berjalan secara efektif dan efisien, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi kerugian negara dapat diturunkan hingga 15% dari temuan Tahun 2006-2009 ▪ Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Itjen Kemenhut sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 6 satker <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Itjen Kemenhut dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut "wajar tanpa pengecualian" mulai laporan keuangan Tahun 2011 sebanyak 6 Satker 	30,98
8.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Kemenhut secara efektif dan efisien, serta mewujudkan reformasi birokrasi		425,53
a.	Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan	terselenggaranya koordinasi perencanaan dan evaluasi Kementerian Kehutanan secara baik dan mantap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyerapan anggaran meningkat minimal menjadi 85% diakhir Tahun 2012 	84,39

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikator (Milyar Rp)
b.	Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian	terselenggaranya tertib dan pelayanan administrasi kepegawaian Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pencapaian sasaran strategis minimal 54% di akhir Tahun 2012 ▪ Model implementasi kebijakan kehutanan di 3 kabupaten ▪ Pelayanan administrasi kepegawaian minimal 90% akurat dan tepat waktu. ▪ Prasarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal terpenuhi 90%. ▪ Data kepegawaian dalam SIMPEG minimal 90% sesuai dengan data yang dimiliki individu PNS. 	18,90
c.	Penyelenggaraan dan Pembinaan Tata Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan	mantapnya tata hukum dan organisasi di lingkup Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Kemenhut minimal sebesar 45% di akhir Tahun 2012. ▪ Pencapaian penelaahan hukum peraturan perundang-undangan lingkup Kemenhut minimal sebesar 48% di akhir Tahun 2012. ▪ Penanganan perkara, pemulihan hak negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 48% di akhir Tahun 2012. ▪ Pencapaian pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan lingkup Kemenhut minimal sebesar 42% di 	11,80

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikator (Milyar Rp)
d.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian Kehutanan	tertibnya pelaksanaan administrasi keuangan Kementerian Kehutanan	<p>akhir Tahun 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 69 unit perusahaan terselesaikan KUK-DAS, KUHR dan KUPA serta PSDH DR sebesar 45% ▪ Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan " wajar tanpa pengecualian" mulai laporan Tahun 2011, sebanyak 1 judul ▪ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 2,75 Trilyun 	59,35
e.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian Kehutanan.	tertibnya pelaksanaan tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara (BMN) Kementerian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SIMAK BMN Kementerian Kehutanan akurat dan tepat waktu sebanyak 225 satuan kerja per tahun ▪ Sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia/pejabat pengadaan di Kementerian Kehutanan sebanyak 200 orang ▪ Sertifikasi tanah milik Kementerian Kehutanan di 5 lokasi (Mangala Wanabakti, Kanci, Cimanggis, Kramatjati, dan Rumpin) ▪ Terselenggaranya status pencatatan BMN eks Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 5 provinsi. 	157,23

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikatorif (Milyar Rp)
f.	Pembinaan Standarisasi, Pengelolaan Lingkungan dan Penanganan Perubahan Iklim Kehutanan	berkembangnya standarisasi produk, proses, dan kompetensi teknis di bidang kehutanan , peningkatan pengelolaan lingkungan dan penanganan perubahan iklim kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Standar produk dan jasa kehutanan, serta pedoman pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim, 7 produk ▪ Sertifikasi pengelolaan hutan rakyat,3 unit ▪ Rekomendasi kebijakan penanganan perubahan iklim kehutanan sebanyak 1 paket 	11,69
g.	Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri	meningkatkan peran dan posisi Indonesia di bidang kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) di bidang kehutanan sebanyak 3 paket per tahun ▪ Komitmen kerjasama internasional di bidang kehutanan (bilateral, multilateral, regional, dan multipihak) sebanyak 1 paket ▪ Kerjasama baru bilateral sebanyak 1 negara dan multipihak sebanyak 1 lembaga ▪ Laporan monitoring dan evaluasi kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) sebanyak 3 paket per tahun 	22,26
h.	Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan	memperkuat pemahaman dan komitmen masyarakat terhadap pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan citra positif Kemenhut sebesar 10% per tahun. 	30,71

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikator (Milyar Rp)
		kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya berita kegiatan pimpinan Kemenhut sebesar 10% per tahun. ▪ Meningkatnya publikasi kebijakan program pembangunan kehutanan sebesar 10% per tahun. ▪ Hubungan dengan lembaga tinggi negara, pemerintah dan lembaga non pemerintah meningkat sebesar 10% per tahun. 	
i.	Pengelolaan Keuangan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Kehutanan	fasilitasi dan ketersediaan pembiayaan pembangunan kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kredit pembangunan hutan tanaman (hutan tanaman industri , hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat) seluas 80.000 ha ▪ Pemahaman terhadap skim pinjaman pembangunan hutan tanaman di 12 kabupaten Tahun 2012 ▪ Peningkatan penguatan kelembagaan debitur di 3 kabupaten Tahun 2012 	10,80
j.	Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I	Terselenggaranya perencanaan kehutanan di regional I	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional I berjalan minimal 54% ▪ Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional I, 1 dokumen 	4,50
k.	Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II	Terselenggaranya perencanaan kehutanan di regional II	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional II berjalan minimal 54% 	4,60

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	Target Indikator Kinerja Tahun 2012	Pembiayaan Indikatorif (Milyar Rp)
l.	Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III	Terselenggaranya perencanaan kehutanan di regional III	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional II, 1 dokumen ▪ Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional III berjalan minimal 54% ▪ Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional III , 1 dokumen 	4,43
m.	Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV	Terselenggaranya perencanaan kehutanan di regional IV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional IV berjalan minimal 54% ▪ Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional IV, 1 dokumen 	4,87
Jumlah				6.001.06

Lampiran 1. Kegiatan Non Prioritas Tahun 2012

Kode	Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target			Alokasi (Rp Milyar)			Ket (N/B/KL)		
			Rencana 2012	Prakiraan Maju 2013	2014	2015	Rencana 2012	Prakiraan Maju 2013		2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
09	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan						681,80	687,74	830,96	830,96	
09	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan						681,80	687,74	830,96	830,96	
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 23 satker	23 Satker	23 Satker	23 Satker	23 Satker	72,00	67,92	68,85	68,85	
		Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dalam rangka mewujudkan	23 Satker	23 Satker	23 Satker	23 Satker					

Kode	Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target				Alokasi (Rp Milyar)				Ket (N/B/KL)
			Rencana 2012	2013	2014	2015	Rencana 2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		opini laporan keuangan Kemenhut "wajar tanpa pengecualian" mulai laporan keuangan Tahun 2011 sebanyak 23 Satker									
06	Peningkatan Usaha Kehutanan						340.78	353.71	358.54	358.54	
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Usaha Kehutanan	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen BUK sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 24 satker	24 Satker	24 Satker	24 Satker	24 Satker	47.85	45.92	46.55	46.55	
		Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen BUK dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut "wajar tanpa pengecualian" mulai laporan keuangan Tahun 2011 sebanyak 24 Satker	24 Satker	24 Satker	24 Satker	24 Satker					

Kode	Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target				Alokasi (Rp Milyar)				Ket (N/B/KL)
			Rencana 2012	2013	2014	2015	Rencana 2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
08	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan						1,386.28	1,337.10	1,355.33	1,355.33	
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PHKA sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 81 satker	81 Satker	81 Satker	81 Satker	81 Satker	61.25	61.38	62.22	62.22	
		Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen PHKA dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut "wajar tanpa pengecualian" mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 81 Satker	81 Satker	81 Satker	81 Satker	81 Satker					
		Terbangunnya persiapan sistem pengelolaan BLU di 12 UPT PHKA	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit					

Kode	Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target			Alokasi (Rp Milyar)			Ket (N/B/KL)		
			Rencana 2012	Prakiraan Maju 2013	2014	2015	Rencana 2012	2013		2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
07	Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat						2,600.00	3,132.02	3,174.71	3,174.71	
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen BPDASPS sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 50 satker	50 Satker	50 Satker	50 Satker	50 Satker	84.60	271.24	274.94	274.94	
		Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Ditjen BPDASPS dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut "wajar tanpa pengecualian" mulai laporan keuangan Tahun 2011 sebanyak 50 Satker	50 Satker	50 Satker	50 Satker	50 Satker					
04	Penelitian dan Pengembangan Kementrian Kehutanan						270.49	275.66	279.42	279.42	

Kode	Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target			Alokasi (Rp Milyar)			Ket (N/B/KL)		
			Rencana 2012	Prakiraan Maju 2013	2014	2015	Rencana 2012	Prakiraan Maju 2013		2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	§ Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Kehutanan kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 20 satker	20 Satker	20 Satker	20 Satker	20 Satker	26.26	34.44	34.91	34.91	
		Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Litbang Kemenhut dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut "wajar tanpa pencucialan" mulai laporan keuangan Tahun 2011 sebanyak 20 Satker	20 Satker	20 Satker	20 Satker	20 Satker					
		Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)	33 Unit KHDTK	33 Unit KHDTK	33 Unit KHDTK	33 Unit KHDTK					
10	Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan						240.94	245.56	248.91	248.91	

Kode	Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target			Alokasi (Rp Milyar)			Ket (N/B/KL)		
			Rencana 2012	Prakiraan Maju 2013	2014	2015	Rencana 2012	2013		2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan	§ Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 17 satker	17 Satker	17 Satker	17 Satker	17 Satker	27.80	64.87	65.76	65.76	
		Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut "wajar tanpa pengecualian" mulai laporan keuangan Tahun 2011 sebanyak 17 Satker	17 Satker	17 Satker	17 Satker	17 Satker					
			12 Dokumen Kerjasama	13 Dokumen Kerjasama	13 Dokumen Kerjasama	13 Dokumen Kerjasama					

Kode	Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target			Alokasi (Rp Milyar)			Ket (N/B/KL)		
			Rencana 2012	2013	2014	2015	Rencana 2012	2013		2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		masyarakat									
		Terbentuknya kelembagaan penyuluhan di 6 provinsi dan 100 kabupaten/kota.	1 Provinsi, 20 kab/kota	1 Provinsi, 25 kab/kota	1 Provinsi, 25 kab/kota	1 Provinsi, 25 kab/kota					
	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan						55.24	56.30	57.07	57.07	
	Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat I	Kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektorat I ditekan hingga 50% dari Tahun 2009	30%	40%	50%	50%	4.82	5.00	5.07	5.07	KL
		Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat I berkurang hingga 50% dari Tahun 2009	30%	40%	50%	50%					

Kode	Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target			Alokasi (Rp Milyar)			Ket (N/B/KL)		
			Rencana 2012	Prakiraan Maju 2013	2014	2015	Rencana 2012	Prakiraan Maju 2013		2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektoral I berkurang hingga 50% dari Tahun 2009	30%	40%	50%	50%					
	Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektoral II	Kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektoral II ditekan hingga 50% dari Tahun 2009	30%	40%	50%	50%	4.99	5.18	5.25	5.25	KL
		Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektoral II berkurang hingga 50% dari Tahun 2009	30%	40%	50%	50%					
		Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektoral II berkurang hingga 50% dari Tahun 2009	30%	40%	50%	50%					
	Pengawasan Terhadap Kinerja,	Kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektoral III ditekan	30%	40%	50%	50%	5.36	5.56	5.64	5.64	KL

Kode	Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target			Alokasi (Rp Milyar)			Ket (N/B/KL)			
			Rencana 2012	Prakiraan Maju 2013	2014	2015	Rencana 2012	2013		2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat III	hingga 50% dari Tahun 2009										
		Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat III berkurang hingga 50% dari Tahun 2009	30%	40%	50%	50%						
		Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat III berkurang hingga 50% dari Tahun 2009	30%	40%	50%	50%						
	Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat IV	Kelemahan administrasi di wilayah kerja Inspektorat IV ditekan hingga 50% dari tahun T009	30%	40%	50%	50%	5.25	5.45	5.52	5.52		KL
		Pelanggaran terhadap peraturan perundangan di wilayah kerja Inspektorat IV berkurang hingga 50%	30%	40%	50%	50%						

Kode	Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target			Alokasi (Rp Milyar)			Ket (N/B/KL)		
			Rencana 2012	Prakiraan Maju 2013	2014	2015	Rencana 2012	Prakiraan Maju 2013		2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		dari Tahun 2009									
		Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah kerja Inspektorat IV berkurang hingga 50% dari Tahun 2009	30%	40%	50%	50%					
	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	Potensi kerugian negara dapat diturunkan hingga 25% dari temuan Tahun 2006-2009	15%	20%	25%	25%	3.84	3.99	4.04	4.04	KL
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Itjen Kemenhut sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 6 satker	6 Satker	6 Satker	6 Satker	6 Satker	30.98	31.12	31.54	31.54	
		Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Itjen Kemenhut dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut 'wajar tanpa	6 Satker	6 Satker	6 Satker	6 Satker					

Kode	Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target			Alokasi (Rp Milyar)			Ket (N/B/KL)		
			Rencana 2012	Prakiraan Maju 2013	2014	2015	Rencana 2012	Prakiraan Maju 2013		2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		pengecualian" mulai laporan keuangan Tahun 2011 sebanyak 6 Satker									
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan						425.53	441.68	447.70	447.70	
	Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan	Penyerapan anggaran meningkat minimal menjadi 90% diakhir Tahun 2014	85%	87%	90%	90%	84.39	87.59	88.79	88.79	KL
		Pencapaian sasaran strategis minimal 95% di akhir Tahun 2014	54%	72%	95%	95%					
		Model implementasi kebijakan kehutanan di 3 kabupaten	3 Kab.	3 Kab.	3 Kab.	3 Kab.					
	Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian	Pelayanan administrasi kepegawaian minimal 95% akurat dan tepat waktu.	90%	92%	95%	95%	18.90	19.62	19.88	19.88	KL

Kode	Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target				Alokasi (Rp Milyar)				Ket (N/B/KL)
			Rencana 2012	2013	2014	2015	Rencana 2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Prasarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal terpenuhi 95%.	90%	92%	95%	95%					
		Data kepegawaian dalam SIMPEG minimal 98% sesuai dengan data yang dimiliki individu PNS	90%	95%	98%	98%					
	Penyelenggaraan dan Pembinaan Tata Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan	Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Kemenhut minimal sebesar 75% di akhir tahun 2014.	45%	60%	75%	75%	11.80	12.25	12.41	12.41	KL
		Pencapaian penelaahan hukum peraturan perundang-undangan lingkup Kemenhut minimal sebesar 80% di akhir tahun 2014.	48%	64%	80%	80%					
		Penanganan perkara, pemulihan hak-hak negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 80% di akhir tahun 2014.	48%	64%	80%	80%					

Kode	Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target			Alokasi (Rp Milyar)			Ket (N/B/KL)		
			Rencana 2012	Prakiraan Maju 2013	2014	2015	Rencana 2012	Prakiraan Maju 2013		2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pencapaian pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan lingkup Kemenhut minimal sebesar 70% di akhir tahun 2014.	42%	56%	70%	70%					
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian Kehutanan	Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 69 unit perusahaan terselesaikan KUK-DAS, KUHR dan KUPA serta PSDH DR sebesar 80%	45%	60%	80%	80%	59.35	61.60	62.44	62.44	KL
		Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan " wajar tanpa pengecualian" mulai laporan tahun 2011, sebanyak 5 judul (1 judul setiap tahun)	1 Judul	1 Judul	1 Judul	1 Judul					
		Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 13,75 Trilyun	Rp 2,75 T	Rp 2,75 T	Rp 2,75 T	Rp 2,75 T					
	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pengelolaan	SIMAK BMN Kementerian Kehutanan akuntabel dan tepat waktu sebanyak 225 satuan	225 Satker	225 Satker	225 Satker	225 Satker	157.23	170.91	173.20	173.20	KL

Kode	Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target				Alokasi (Rp Milyar)				Ket (N/B/KL)
			Rencana 2012	Prakiraan Maju 2013	2014	2015	Rencana 2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perencanaan Kementerian Kehutanan	kerja per tahun									
		Sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) dan paritia/pejabat pengadaan di Kementerian Kehutanan sebanyak 1.000 orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang					
		Sertifikasi tanah milik Kementerian Kehutanan di 5 lokasi (Mangala Wanabakti, Kanci, Cimanggis, Kramatjati, dan Rumpin)	5 Lokasi	-	-	-					
		Terselesaikannya status pencatatan BMN eks Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 provinsi	5 Prov.	-	-	-					
	Pembinaan Standarisasi, Pengelolaan Lingkungan dan	Standard produk dan jasa kehutanan, serta pedoman pengelolaan lingkungan dan	7 Produk	7 Produk	9 Produk	9 Produk	11.69	12.13	12.30	12.30	KL

Kode	Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target				Alokasi (Rp Milyar)			Ket (N/B/KL)	
			Rencana 2012	2013	2014	2015	Rencana 2012	2013	2014		2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penanganan Perubahan Iklim Kehutanan	perubahan iklim 35 judul	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit					
		Sertifikasi pengelolaan hutan rakyat 15 unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit					
		Rekomendasi kebijakan penanganan perubahan iklim kehutanan sebanyak 5 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket					
	Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri	Partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) di bidang kehutanan sebanyak 3 paket per tahun	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	22.26	23.10	23.42	23.42	KL
		Komitmen kerjasama internasional di bidang kehutanan (bilateral, multilateral, regional, dan multipihak) sebanyak 5 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket					
		Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak sebanyak 3 lembaga	1 Negara, 1 lembaga	1 Negara	1 Negara	1 Negara					
		Laporan monitoring dan evaluasi kerjasama	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket					

Kode	Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target				Alokasi (Rp Milyar)				Ket (N/B/KL)
			Rencana 2012	2013	2014	2015	Rencana 2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		internasional (bilateral, multilateral dan regional) sebanyak 3 paket per tahun									
	Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan	Meningkatnya citra positif Kemenhut sebesar 10% per tahun.	10%	10%	10%	10%	30.71	24.16	24.49	24.49	KL
		Meningkatnya berita kegiatan pimpinan Kemenhut sebesar 10% per tahun.	10%	10%	10%	10%					
		Meningkatnya publikasi kebijakan program pembangunan kehutanan sebesar 10% per tahun.	10%	10%	10%	10%					
		Hubungan dengan lembaga tinggi negara, pemerintah dan lembaga non pemerintah meningkat sebesar 10% per tahun	10%	10%	10%	10%					
	Pengelolaan Keuangan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir	Kredit pembangunan hutan tanaman (hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat)	80.000 ha	80.000 ha	80.000 ha	80.000 ha	10.80	11.21	11.36	11.36	KL

Kode	Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target			Alokasi (Rp Milyar)			Ket (N/B/KL)		
			Rencana 2012	Prakiraan Maju 2013	2014	2015	Rencana 2012	Prakiraan Maju 2013		2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembiayaan Pembangunan Kehutanan	seluas 400.000 ha	12 Kab.	12 Kab.	12 Kab.	12 Kab.					
		Pemahaman terhadap skim pinjaman pembangunan hutan tanaman di 60 kabupaten Tahun 2014	12 Kab.	12 Kab.	12 Kab.	12 Kab.					
		Peningkatan penguatan kelembagaan debitur di 15 kabupaten Tahun 2014	3 Kab.	3 Kab.	3 Kab.	3 Kab.					
	Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I	Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional I berjalan minimal 90%	54%	72%	90%	90%	4.50	4.67	4.73	4.73	KL
		Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional I, 2 dokumen	1 Dokumen	-	-	-					
	Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II	Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional II berjalan minimal 90%	54%	72%	90%	90%	4.60	4.77	4.84	4.84	KL
		Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional	1 Dokumen	-	-	-					

Kode	Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target			Alokasi (Rp Milyar)			Ket (N/B/KL)		
			Rencana 2012	Prakiraan Maju 2013	2014	2015	Rencana 2012	Prakiraan Maju 2013		2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		II, 2 dokumen									
	Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III	Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional III berjalan minimal 90%	54%	72%	90%	90%	4.43	4.60	4.66	4.66	KL
		Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional III , 2 dokumen	1 Dokumen	-	-	-					
	Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV	Pelaksanaan pembangunan kehutanan di regional IV berjalan minimal 90%	54%	72%	90%	90%	4.87	5.05	5.12	5.12	KL
		Tersusunnya perencanaan kehutanan di regional IV, 2 dokumen	1 Dokumen	-	-	-					

Lampiran 2. Kegiatan Prioritas Tahun 2012

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator	Target			Alokasi (Rp Milyar)			Ket (N/B/KL)		
			Rencana 2012	Prakiraan Maju		Rencana 2012	Prakiraan Maju				
			(4)	2013	2014	2015	(8)	2013		2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
09	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan						681.80	687.74	830.96	830.96	
2311	Pengukuhan Kawasan Hutan	Terjaminnya tata batas kawasan hutan sepanjang 63.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan	16.000 km	15.000 km	24.000 km	24.000 km	76.54	84.19	92.61	92.61	B
		Penunjukan kawasan hutan provinsi selesai (100%)	100%	-	-	-					
		Penetapan kawasan hutan yang telah di tata batas temu gelang selesai 75% per tahun	75%	75%	75%	75%					
		Rekomendasi perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial selesai 75% per tahun	75%	75%	75%	75%					
		SK pelepasan kawasan hutan secara parsial selesai 75% per tahun	75%	75%	75%	75%					
2313	Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPH di seluruh Indonesia	28 Prov	-	-	-	21.29	23.42	25.76	25.76	B
		Beroperasinya 120 KPH (20% dari KPH yang ditetapkan)	10%	15%	20%	20%					
		Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPHK di seluruh Indonesia	60%	80%	100%	100%					
		Peraturan perundangan tentang penyelenggaraan KPH sebanyak 4 judul	1 Judul	-	-	-					
		Peta areal kerja dan peta pencadangan izin pemanfaatan hutan selesai 80%	50%	70%	80%	80%					

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator	Target			Alokasi (Rp Milyar)			Ket (N/B/KL)	
			Rencana 2012	Prakiraan Maju		Rencana 2012	Prakiraan Maju			
			(4)	2013	2014	2015	(8)	2013		2014
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2312	Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan	Rencana makro penyelenggaraan kehutanan sebanyak 4 judul	1 judul	-	-	16.86	16.17	16.39	16.39	B
		Persetujuan substansi teknis kehutanan terhadap usulan revisi tata ruang di 26 provinsi	80%	100%	100%					
		Sistem jaringan komunikasi data kehutanan LAN pusat dan WAN 17 provinsi sebanyak 1 sistem per tahun	1 sistem	1 sistem	1 sistem					
2309	Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan tingkat nasional sebanyak 5 judul	1 judul	1 judul	1 judul	28.93	44.94	45.56	45.56	B
		Data dan informasi sumberdaya hutan pada kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul	1 judul	1 judul	1 judul					
		Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul	1 judul	1 judul	1 judul					
		Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update	1 kali	1 kali	1 kali					
2310	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di luar Kegiatan Kehutanan	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan terlayani 100% secara tepat waktu	100%	100%	100%	14.72	14.14	14.33	14.33	B
		Wajib bayar tertib membayar PNPB Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80% per tahun	80%	80%	80%					
		Data dan informasi penggunaan kawasan hutan di 33 provinsi	6 Prov	7 Prov	7 Prov					
		Peraturan perundangan penggunaan kawasan hutan, 3 judul	1 Judul	-	-					

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator	Target						Alokasi (Rp Milyar)				Ket (N/B/KL)	
			Rencana 2012		Prakiraan Maju		Rencana 2012		Prakiraan Maju		2013	2014		2015
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
2314	Penyiapan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Tata batas kawasan hutan sepanjang 63.000 km	16.000 km	15.000 km	24.000 km	24.000 km	451.46	436.96	567.46	567.46	567.46	B		
		Neraca Sumberdaya Hutan di 17 BPKH	17 BPKH	17 BPKH	17 BPKH	17 BPKH								
		Tersedianya Sarpras dan tata hutan KPH	60 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit								
		Enumerasi dan re-Enumerasi TSP/PSP	599 Plot	599 Plot	599 Plot	599 Plot								
06	Peningkatan Usaha Kehutanan						340.78	353.71	358.54	358.54	358.54			
2286	Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	Penambahan luas areal pencadangan izin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta Ha	500.000 Ha	750.000 Ha	750.000 Ha	750.000 Ha	29.02	27.54	27.91	27.91	27.91	B		
		Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 2,65 juta ha.	500.000 Ha	600.000 Ha	550.000 Ha	550.000 Ha								
		Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 50 unit manajemen hutan tanaman	10 unit	10 unit	11 unit	11 unit								
2285	Peningkatan Usaha Hutan Alam	Produksi hasil hutan kayu sebesar 5 %	1%	1%	1%	1%	22.21	30.07	30.48	30.48	30.48	B		
		Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 50 %	10%	10%	10%	10%								
		50% produksi penebangan bersertifikat Legalitas Kayu	30%	40%	50%	50%								
2287	Perencanaan Pemanfaatan dan Peningkatan Usaha Kawasan Hutan	Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan produksi	60%	80%	100%	100%	20.12	15.46	15.67	15.67	15.67	B		
		Tersedianya areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 provinsi	60%	80%	100%	100%								

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator	Target						Alokasi (Rp Milyar)			Ket (N/B/KL)		
			Rencana 2012		Prakiraan Maju		Rencana 2012		Prakiraan Maju		2013		2014	2015
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
		Produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 5%	1%	1%	1%	1%								
		Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan (LOA) seluas 2,5 juta Ha	450.000 Ha	650.000 Ha	750.000 Ha	750.000 Ha								
2284	Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Turan Hasil Hutan	PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 10%	2%	2%	2%	2%	27.61	28.14	28.52	28.52	B			
		Implementasi SIM PUHH secara online di seluruh unit management IUPHHK dan IUPHHK	60%	80%	100%	100%								
2288	Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan	Pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah (kumulatif) meningkat 75%	15%	15%	15%	15%	23.78	45.54	46.16	46.16	B			
		Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 50%	10%	10%	10%	10%								
		Efisiensi penggunaan bahan baku industri meningkat sebesar 10% (rata-rata 2% per tahun)	2%	2%	2%	2%								
2283	Pemantauan Usaha Kehutanan dan Pembinaan Ganis Wasganis PHPL	Dokumen peredaran tertib sesuai peraturan perundangan minimal 95% di Tahun 2014	85%	90%	95%	95%	170.19	161.06	163.25	163.25	B			
		Kualitas kinerja Ganis dan Wasganis meningkat minimal menjadi 60% di Tahun 2014	50%	55%	60%	60%								
		Pembangunan HTR seluas 400.000 Ha	80.000 Ha	80.000 Ha	80.000 Ha	80.000 Ha								
08	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan						1,386.28	1,337.10	1,355.33	1,355.33				

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator	Target						Alokasi (Rp Milyar)			Ket (N/B/KL)
			Rencana 2012		Prakiraan Maju		Rencana 2012		Prakiraan Maju			
			2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
2300	Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial dan Pembinaan Hutan Lindung	Terjaminnya konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5% Terjaminnya pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyanga kehidupan meningkat 10%. Terjaminnya penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng) Terjaminnya restorasi ekosistem kawasan konservasi, 4 lokasi	1% 2% 2 Prov 1 lokasi	1% 2% 3 Prov 1 lokasi	1% 2% 3 Prov 1 lokasi	1% 2% 3 Prov 1 lokasi	50.48	51.43	52.13	52.13	B	
		Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 51 TN prioritas	10 TN	10 TN	11 TN	11 TN						
		Terjaminnya peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi	2 Prov	2 Prov	2 Prov	2 Prov						
		Terjaminnya peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp. 800.000,00 per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat	6%	6%	6%	6%						
2304	Penyidikan dan Pengamanan Hutan	Terjaminnya kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penanganan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75%	45%	60%	75%	75%	63.99	65.21	66.10	66.10	B	

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (Rp Milyar)			Ket (N/B/KL)	
			Rencana 2012	Prakiraan Maju			Rencana 2012	Prakiraan Maju				
				2013	2014	2015		2013	2014	2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		Terjaminsnya tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun	57.80%	68.40%	76.30%	76.30%						
		Terjaminsnya kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20%	12%	16%	20%	20%						
		Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan di 10 provinsi	10 Prov	10 Prov	10 Prov	10 Prov						
2301	Pengembangan Konservasi Spesies dan Genetik	Terjaminsnya populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kesediaan habitat	1.50%	2%	3%	3%	17.82	18.16	18.41	18.41	18.41	B
		Terjaminsnya penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 5%	1%	1%	1%	1%						
		Kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi keanekaragaman hayati sebanyak 1 paket per tahun	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket						
		Terselenggaranya skema DNS Kehutanan, 2 aktifitas	2 aktifitas	2 aktifitas	2 aktifitas	2 aktifitas						
2303	Pengendalian Kebakaran Hutan	Terjaminsnya hotspot di pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009	48.80%	59.20%	67.20%	67.20%	57.02	58.12	58.91	58.91	58.91	N
		Terjaminsnya kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009	30%	40%	50%	50%						

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator	Target						Alokasi (Rp Milyar)			Ket (N/B/KL)
			Rencana 2012	Prakiraan Maju			Rencana 2012	Prakiraan Maju				
				2013	2014	2015		2013	2014	2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
2302	Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan	Peningkatan kapasitas aparat: pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (10 Provinsi) Terjeminnya perusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 2008 Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit. Terjeminnya PNBP dibidang perusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008. Pelaksanaan demonstration activity REDD di 2 kawasan konservasi (hutan gambut) Terjeminnya Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang dapat diberdayakan meningkat 10% dari tahun 2009 Konflik dan tekanan terhadap kawasan Taman Nasional menurun sebanyak 5% Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 51 TN Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan ilegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75%	6 DAOPS	6 DAOPS	6 DAOPS	6 DAOPS	17.31	17.65	17.89	17.89	17.89	B
2306	Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional		1%	1%	1%	1%	563.11	533.11	540.38	540.38	B	

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator	Target			Alokasi (Rp Milyar)				Ket (N/B/KL)	
			Rencana 2012	Prakiraan Maju		Rencana 2012	Prakiraan Maju		Ket		
				2013	2014		2015	2013			2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Tinggalkan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun	57.80%	68.40%	76.30%	76.30%					
		Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20%	12%	16%	20%	20%					
		Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kesediaan habitat	1.50%	2%	3%	3%					
		Hotspot di pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009	48.80%	59.20%	67.20%	67.20%					
		Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009	30%	40%	50%	50%					
		Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 2008	36%	48%	60%	60%					
		PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008.	60%	80%	100%	100%					
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar Taman Nasional	51 TN	51 TN	51 TN	51 TN					
		Terseledainya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan di seluruh Indonesia	51 TN	51 TN	51 TN	51 TN					
2305	Pengembangan Pengelolaan Konservasi	Konflik dan tekanan terhadap kawasan CA, SM, TB dan HL menurun sebanyak 5%	1%	1%	1%	1%	555.30	532.03	539.29	539.29	B

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator	Target				Alokasi (Rp Milyar)				Ket (N/B/KL)
			Prakiraan Maju		Prakiraan Maju		Rencana		Prakiraan Maju		
			Rencana 2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sumberdaya Alam	Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10 %	2%	2%	2%	2%					
		Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75%	45%	60%	75%	75%					
		Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun	57.80%	68.40%	76.30%	76.30%					
		Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20%	12%	16%	20%	20%					
		Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kesediaan habitat	1.50%	2%	3%	3%					
		Hotspot di pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009	48.80%	59.20%	67.20%	67.20%					
		Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009	30%	40%	50%	50%					
		Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 2008	36%	48%	60%	60%					
		PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008.	60%	80%	100%	100%					

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator	Target						Alokasi (Rp Milyar)			Ket (N/B/KL)
			Rencana 2012		Prakiraan Maju		Rencana 2012		Prakiraan Maju		2015	
			2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar kawasan konservasi	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov						
		Terseidanya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan di seluruh Indonesia	116 dokumen	116 dokumen	116 dokumen	116 dokumen						
07	Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat						2,600.00	3,132.02	3,174.71	3,174.71	3,174.71	
2292	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 500.000 Ha.	100.000 Ha	100.000 Ha	100.000 Ha	100.000 Ha	22.40	61.02	61.85	61.85		N
		Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 1.954.000 Ha.	399.000 Ha	537.000 Ha	540.000 Ha	540.000 Ha						
		Terjaminnya hutan kota seluas 6.000 Ha.	1.000 Ha	1.000 Ha	-	-						
		Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 40.000 Ha	-	10.000 Ha	10.000 Ha	10.000 Ha						
2291	Pengembangan Perhutanan Sosial	Terjaminnya hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta Ha	400.000 Ha	400.000 Ha	400.000 Ha	400.000 Ha	18.23	18.58	18.83	18.83		N
		Terjaminnya izin usaha pengelolaan HKm sebanyak 500 lembaga	100 Klpk	100 Klpk	100 Klpk	100 Klpk						
		Terjaminnya kemitraan usaha HKm sebanyak 50 unit	10 Unit	15 Unit	10 Unit	10 Unit						
		Terjaminnya dukungan ketahanan pangan di 32 provinsi	6 Prov	7 Prov	7 Prov	7 Prov						

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator	Target						Alokasi (Rp Milyar)			Ket (N/B/KL)
			Rencana 2012	Prakiraan Maju			Rencana 2012	Prakiraan Maju				
				2013	2014	2015		2013	2014	2015		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		Terjaminnya hutan rakyat kemitraan untuk bahan kayu industri pertukangan seluas 250.000 Ha	50.000 Ha	50.000 Ha	50.000 Ha	50.000 Ha						
		Terjaminnya sentra HHBK Unggulan terbentuk dan beroperasi di 30 lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi						
		Terjaminnya hutan desa seluas 500.000 Ha	100.000 Ha	100.000 Ha	100.000 Ha	100.000 Ha						
2294	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Terjaminnya areal sumber benih seluas 4.500 Ha dikelola secara baik	4.500 Ha	4.500 Ha	4.500 Ha	4.500 Ha	20.92	21.32	21.61	21.61	B	
		Terjaminnya areal sumber benih seluas 6.000 Ha	1.200 Ha	1.200 Ha	1.500 Ha	1.500 Ha						
		Terjaminnya pengembangan Seed for People 100 lokasi	20 Lokasi	20 Lokasi	20 Lokasi	20 Lokasi						
		Terjaminnya sentra bibit 33 unit terbangun	5 unit	3 unit	5 unit	5 unit						
2293	Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	Terjaminnya rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas	36 DAS	2 DAS	-	-	53.46	54.48	55.22	55.22	N	
		Terjaminnya base line data pengelolaan DAS di 108 DAS	36 DAS	2 DAS	-	-						
		Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS	-	-	-	-						
2295	Perencanaan, Penyelenggaraan RHL, Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi DAS	Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, pantai, gambut dan rawa pada DAS prioritas seluas 2,5 juta Ha	500.000 Ha	648.000 Ha	650.000 Ha	650.000 Ha	2.288.85	2.591.71	2.627.04	2.627.04	B	
		Terbangunnya hutan kemasyarakatan (HKM) seluas 2 juta Ha	400.000 Ha	400.000 Ha	400.000 Ha	400.000 Ha						
		Sentra HHBK unggulan terbentuk dan beroperasi	6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi	6 Lokasi						

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator	Target				Alokasi (Rp Milyar)				Ket (N/B/KL)
			Rencana 2012	Prakiraan Maju			Rencana 2012	Prakiraan Maju			
			(4)	2013	2014	2015	(8)	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)		
		di 30 lokasi									
		Terbangunnya hutan rakyat kemitraan untuk bahan kayu industri pertukangan seluas 250.000 Ha	50.000 Ha	50.000 Ha	50.000 Ha						
		Rencana pengelolaan DAS terpadu pada 108 unit DAS	36 DAS	-	-						
		Terbangunnya hutan desa seluas 500.000 Ha	100.000 Ha	100.000 Ha	100.000 Ha						
		Terbangunnya Kebun Bibit Rakyat 48.000 Unit	15.000 Unit	5.000 Unit	10.000 Unit						
		Terbangunnya persemaian permanen 423 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit						
2296	Perencanaan, Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi Hutan Mangrove	Rencana RTRHL mangrove, 2 kegiatan	-	1 kegiatan	-	18.70	19.06	19.32	B		
		Rencana pengelolaan hutan mangrove, 2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan						
		Terbentuk dan berfungsi kelompok kerja mangrove daerah, 31 provinsi	8 Prov	7 Prov	7 Prov						
		Data informasi evaluasi pengelolaan hutan mangrove, 2 kegiatan	-	2 kegiatan	-						
2297	Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan	Areal sumber benih seluas 4.500 Ha terkelola secara baik	4.500 Ha	4.500 Ha	4.500 Ha	78.92	80.43	81.53	B		
		Areal sumber benih seluas 6.000 Ha	1.200 Ha	1.500 Ha	1.500 Ha						
		Pengembangan Seed for People 100 lokasi	20 Lokasi	20 Lokasi	20 Lokasi						

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator	Target			Alokasi (Rp Milyar)			Ket (N/B/KL)		
			Rencana 2012	Prakiraan Maju 2013	Prakiraan Maju 2014	Prakiraan Maju 2015	Rencana 2012	2013		2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2298	Pengembangan Persuteraan Alam	Terbangunnya sentra bibit 33 unit Jumlah unit usaha persuteraan alam meningkat sebesar 15 unit Peningkatan produksi sutera alam segmen hulu sebesar 10%	5 unit 4 unit 5%	3 unit 5 unit 7.50%	5 unit 3 unit 10%	5 unit 3 unit 10%	13.92	14.19	14.38	14.38	B
04	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan						270.49	275.66	279.42	279.42	
2320	Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan	Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul, yaitu : (1) strategi kebijakan bagi pengambil keputusan (decision support system, DSS) dalam penataan ruang dan penatagunaan hutan berbasis DAS; (2) strategi kebijakan (DSS) pengembangan hutan kota; (3) kebijakan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan; (4) teknik perhitungan emisi dan serapan gas rumah kaca (GRK) kehutanan; (5) strategi kebijakan adaptasi terhadap perubahan iklim; (6) strategi penguatan tata kelola kehutanan dan Kinerja Kemenhut; (7) strategi penguatan tata kelola industri dan perdagangan hasil hutan	60%	80%	100%	100%	12.49	31.12	31.54	31.54	B
		Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul tersebut di atas	60%	80%	100%	100%					

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator	Target			Alokasi (Rp Milyar)			Ket (N/B/KL)	
			Rencana 2012	Prakiraan Maju		Rencana 2012	Prakiraan Maju			
			(4)	2013	2014	2015	2013	2014		2015
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2318	Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi	Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul, yaitu : (1) teknik rehabilitasi hutan bekas tebangan; (2) teknik penanaman dan rehabilitasi mangrove; (3) teknik pengelolaan hutan rawa gambut ramah lingkungan; (4) teknik konservasi flora, fauna dan mikroorganisme; (5) teknik pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara lestari; (6) sistem pengelolaan DAS lintas sektoral dan wilayah administrasi; (7) teknik rehabilitasi dan restorasi lahan bekas tambang	60%	80%	100%	100%	108.21	109.68	109.68	B
		Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul tersebut di atas	60%	80%	100%	100%				
2317	Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan	Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang keteknikan kehutanan dan pengelolaan hasil hutan sebanyak 5 judul, yaitu : (1) informasi tentang sifat dasar dan kegunaan kayu sesuai tujuan pemakaiannya; (2) teknik pemanenan hutan ramah lingkungan; (3) teknik pemanfaatan dan peningkatan kualitas kayu serta standarisasi produk kayu; (4) teknik pengolahan, pemanfaatan dan diversifikasi produk HHBK; (5) terobosan perakayaan alat dan teknik substitusi bahan pembantu industri perkayuan	60%	80%	100%	25.61	19.72	19.99	19.99	B
		Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang keteknikan hutan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul tersebut di atas.	60%	80%	100%					

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator	Target			Alokasi (Rp Milyar)			Ket (N/B/KL)		
			Rencana 2012	Prakiraan Maju 2013	Prakiraan Maju 2014	Prakiraan Maju 2015	Rencana 2012	Prakiraan Maju 2013		Prakiraan Maju 2014	Prakiraan Maju 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2319	Penelitian dan Pengembangan Produktivitas Hutan	Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan dibidang produktivitas hutan sebanyak 6 judul, yaitu : (1) teknik peningkatan produktivitas hutan tanaman penghasil kayu pertukangan; (2) teknik peningkatan produktivitas hutan tanaman penghasil pulp; (3) teknik peningkatan produktivitas jenis-jenis tanaman kayu energi; (4) teknik penyediaan benih unggul; (5) teknik peningkatan produktivitas dan nilai ekonomi HHBK FEM (food, energy, medicine); (6) teknik peningkatan produktivitas dan kualitas produk HHBK non FEM (gaharu, cendana, gemor, sutera, lebah madu, rusa)	60%	80%	100%	100%	93.32	82.17	83.30	83.30	B
		Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang produktivitas hutan sebanyak 6 judul tersebut di atas.	60%	80%	100%	100%					
10	Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan						240.94	245.56	248.91	248.91	
2267	Pengembangan Penyuluhan Kehutanan	Peningkatan efektivitas penyuluhan kehutanan melalui penyusunan program penyuluhan kehutanan nasional sebanyak 5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	18.47	19.16	19.42	19.42	B
		Sertifikat penyuluhan kehutanan sejumlah 1.500 orang	300 orang	500 orang	500 orang	500 orang					
		Kampanye Indonesia Menanam (KIM) di 33	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov					

KODE	Program/ Kegiatan	Indikator	Target				Alokasi (Rp Milyar)				Ket (N/B/KL)
			Rencana 2012	Prakiraan Maju			Rencana 2012	Prakiraan Maju			
				2013	2014	2015		2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		provinsi									
4016	Peningkatan Pelayanan Penyuluhan Kehutanan	Kelompok masyarakat produktif mandiri	100 kelompok	100 kelompok	100 kelompok	100 kelompok	44.29	12.51	12.68	12.68	B
		Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan sejumlah 5.000 orang	1.000 orang	1.000 orang	1.000 orang	1.000 orang					
2268	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan lainnya	Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan administrasi kehutanan minimal sebanyak 15.000 orang peserta	3.000 orang	3.000 orang	3.000 orang	3.000 orang	150.38	149.02	151.05	151.05	B
		Pendidikan menengah kejuruan kehutanan sebanyak 1.440 siswa	855 siswa	1.140 siswa	1.440 siswa	1.440 siswa					
		Pendidikan pasca sarjana jenjang S2 dan S3 sebanyak 325 orang lulusan	65 siswa	65 siswa	65 siswa	65 siswa					
		Sertifikasi ISO 9001 : 2008 Sekoiah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan sejumlah 5 unit	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit					

Lampiran 3. Indikatif Alokasi Dana Dekonsentrasi tahun 2012

No	Provinsi	Program				Jumlah
		Peningkatan Usaha Kehutanan	Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan	Konservasi Keekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	
1	NAD	550,000,000	1,100,000,000	827,300,000	665,000,000	2,807,000,000
2	Sumatera Utara	830,000,000	1,090,000,000	1,255,820,000	700,000,000	2,400,000,000
3	Sumatera Barat	600,000,000	940,000,000	752,300,000	720,000,000	1,822,000,000
4	Riau	680,000,000	1,140,000,000	563,300,000	1,190,000,000	2,430,000,000
5	Kepulauan Riau	300,000,000	780,000,000	555,300,000	600,000,000	856,000,000
6	Jambi	760,000,000	980,000,000	699,300,000	900,000,000	1,199,000,000
7	Sumatera Selatan	675,000,000	920,000,000	904,820,000	855,000,000	1,700,000,000
8	Kep. Bangka Belitung	650,000,000	920,000,000	583,300,000	840,000,000	1,332,000,000
9	Bengkulu	600,000,000	760,000,000	684,300,000	970,000,000	1,081,000,000
10	Lampung	650,000,000	1,060,000,000	1,246,820,000	700,000,000	2,000,000,000
11	Banten	300,000,000	816,300,000	816,300,000	490,000,000	630,500,000
12	DKI Jakarta	225,000,000	570,000,000	513,300,000	425,000,000	383,000,000
13	Jawa Barat	525,000,000	960,000,000	2,355,840,000	525,000,000	655,500,000
14	Jawa Tengah	575,000,000	970,000,000	3,313,840,000	605,000,000	410,000,000
15	Di Yogyakarta	400,000,000	750,000,000	808,300,000	515,000,000	1,235,000,000
16	Jawa Timur	575,000,000	960,000,000	2,443,840,000	575,000,000	752,000,000
17	Bali	500,000,000	720,000,000	922,820,000	500,000,000	425,000,000
18	Nusa Tenggara Barat	950,000,000	950,000,000	1,026,820,000	600,000,000	797,000,000
19	Nusa Tenggara Timur	725,000,000	1,200,000,000	1,033,820,000	800,000,000	2,250,000,000
20	Kalimantan Barat	750,000,000	1,010,000,000	782,300,000	930,000,000	3,000,000,000
21	Kalimantan Tengah	700,000,000	1,090,000,000	667,300,000	845,000,000	3,250,000,000
22	Kalimantan Selatan	760,000,000	1,080,000,000	807,300,000	835,000,000	1,866,000,000
23	Kalimantan Timur	800,000,000	1,170,000,000	616,300,000	870,000,000	6,089,000,000
24	Sulawesi Utara	620,000,000	1,000,000,000	709,300,000	590,000,000	1,166,000,000

No	Provinsi	Program					Jumlah
		Peningkatan Usaha Kehutanan	Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	
25	Sulawesi Tenggara	650,000,000	1,000,000,000	957,820,000	650,000,000	1,191,000,000	4,448,820,000
26	Sulawesi Tengah	700,000,000	990,000,000	880,300,000	600,000,000	2,186,000,000	5,356,300,000
27	Sulawesi Selatan	710,000,000	1,200,000,000	1,715,820,000	840,000,000	893,000,000	5,358,820,000
28	Sulawesi Barat	630,000,000	760,000,000	703,300,000	525,000,000	1,145,000,000	3,763,300,000
29	Gorontalo	750,000,000	820,000,000	630,300,000	600,000,000	2,368,000,000	5,168,300,000
30	Maluku	600,000,000	950,000,000	574,300,000	370,000,000	3,000,000,000	5,494,300,000
31	Maluku Utara	620,000,000	1,080,000,000	617,300,000	475,000,000	1,362,000,000	4,154,300,000
32	Papua	730,000,000	1,240,000,000	716,300,000	600,000,000	4,181,000,000	7,467,300,000
33	Papua Barat	750,000,000	940,000,000	571,300,000	575,000,000	3,070,000,000	5,906,300,000
Jumlah		20,840,000,000	21,410,000,000	32,256,680,000	22,480,000,000	59,932,000,000	165,688,680,000

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN